PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PARIWISATA
KAB. TANAH LAUT

LAPORAN KINERJA
DINAS PARIWISATA
2025

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT

JANUARI 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta ketentuan pelaporan kinerja instansi pemerintah lainnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029 yang selaras dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu “Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”. Dalam mendukung misi pembangunan ekonomi inklusif, Dinas Pariwisata menetapkan 1 (satu) tujuan strategis yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)” dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi sebesar 12,26% dengan capaian 122,6% kategori “Sangat Tinggi”. Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi sebesar 15,62% dengan capaian 156,2% kategori Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 adalah 139,4% dengan kategori “Sangat Tinggi”, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi sumber daya.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Pariwisata didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp21.246.804.116,67 yang dialokasikan melalui program utama, yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh peningkatan promosi pariwisata, penguatan kapasitas SDM, pengembangan destinasi wisata, serta pembinaan dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya juga telah dilakukan,

antara lain melalui penyusunan pohon kinerja, penyempurnaan formulasi IKU, penguatan monitoring kinerja berbasis e-kinerja, serta peningkatan kualitas penyajian dokumen laporan kinerja.

Meskipun capaian kinerja berada pada kategori sangat tinggi, masih terdapat tantangan strategis seperti peningkatan kualitas SDM kepariwisataan, optimalisasi pendataan sektor pariwisata, pengembangan destinasi unggulan yang berkelanjutan, serta penguatan promosi berbasis digital dan ramah lingkungan.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas program, serta kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun-tahun mendatang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai

memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Pariwisata telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

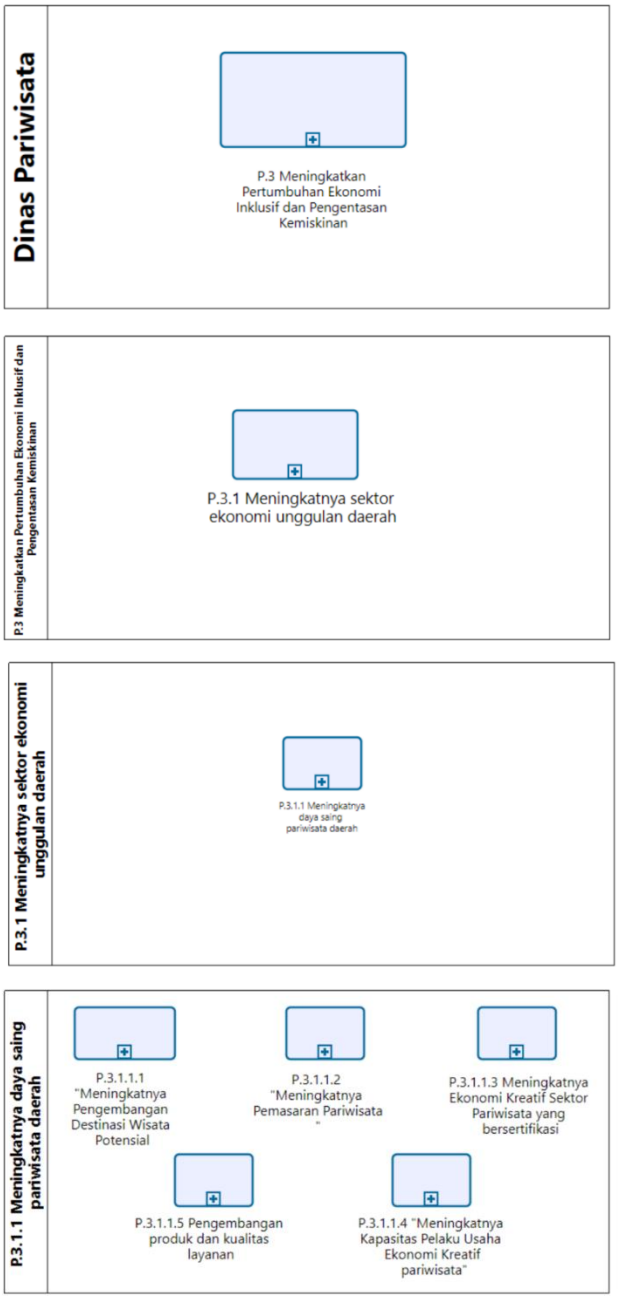

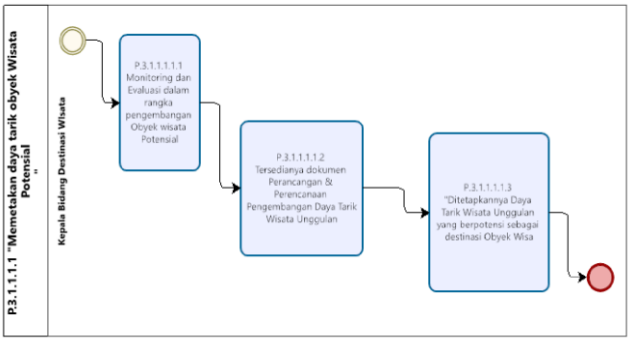
P.3.1.1.1.1 "Memetakan daya tarik obyek Wisata Potensial "
Kepala Bidang Destinasi Wisata
P.3.1.1.1.1.1 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengembangan Obyek wisata Potensial
P.3.1.1.1.1.2 Tersedianya dokumen Perancangan & Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan
P.3.1.1.1.1.3 "Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan yang berpotensi sebagai destinasi Obyek Wisa

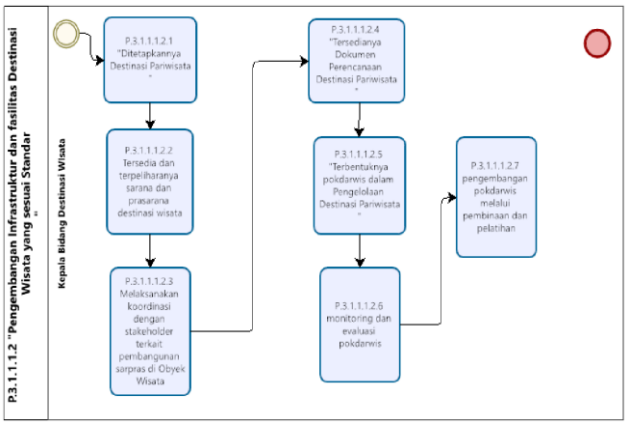
P.3.1.1.1.2 "Pengembangan Infrastruktur dan fasilitas Destinasi Wisata yang sesuai Standar "
Kepala Bidang Destinasi Wisata
P.3.1.1.1.2.1 "Ditetapkannya Destinasi Pariwisata "
P.3.1.1.1.2.2 Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata
P.3.1.1.1.2.3 Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait pembangunan sarpras di Obyek Wisata
P.3.1.1.1.2.4 "Tersedianya Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata "
P.3.1.1.1.2.5 "Terbentuknya pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata "
P.3.1.1.1.2.6 monitoring dan evaluasi pokdarwis
P.3.1.1.1.2.7 pengembangan pokdarwis melalui pembinaan dan pelatihan

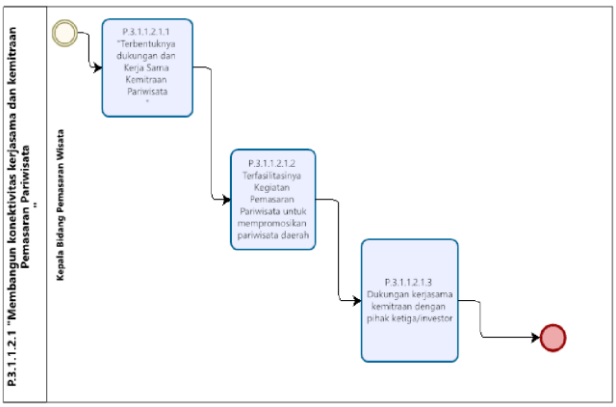
P.3.1.1.2.1 "Membangun konektivitas kerjasama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata "
Kepala Bidang Pemasaran Wisata
P.3.1.1.2.1.1 "Terbentuknya dukungan dan Kerja Sama Kemitraan Pariwisata "
P.3.1.1.2.1.2 Terfasilitasinya Kegiatan Pemasaran Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata daerah
P.3.1.1.2.1.3 Dukungan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga/investor

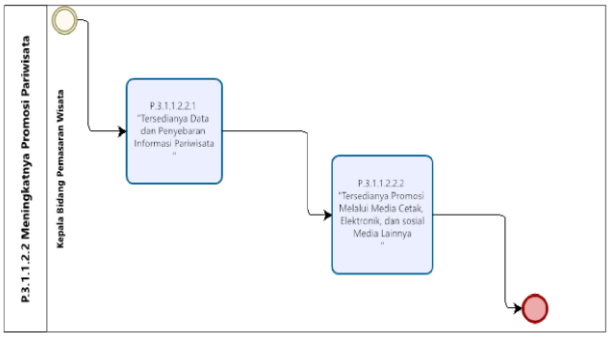
P.3.1.1.2.2 Meningkatnya Promosi Pariwisata
Kepala Bidang Pemasaran Wisata
P.3.1.1.2.2.1 "Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata "
P.3.1.1.2.2.2 "Tersedianya Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan sosial Media Lainnya "

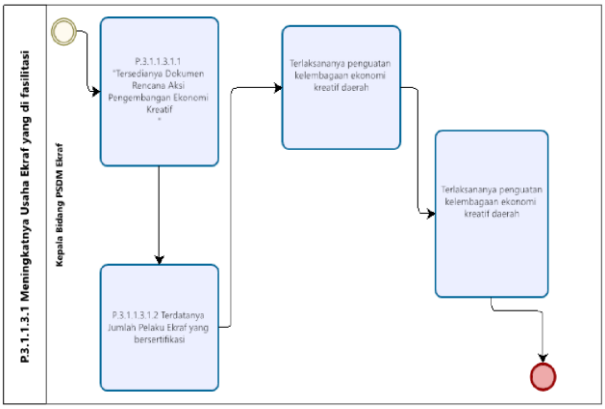
P.3.1.1.3.1 Meningkatnya Usaha Ekraf yang di fasilitasi
Kepala Bidang PSDM Ekraf
P.3.1.1.3.1.1 "Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif "
P.3.1.1.3.1.2 Terdatanya Jumlah Pelaku Ekraf yang bersertifikasi
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah

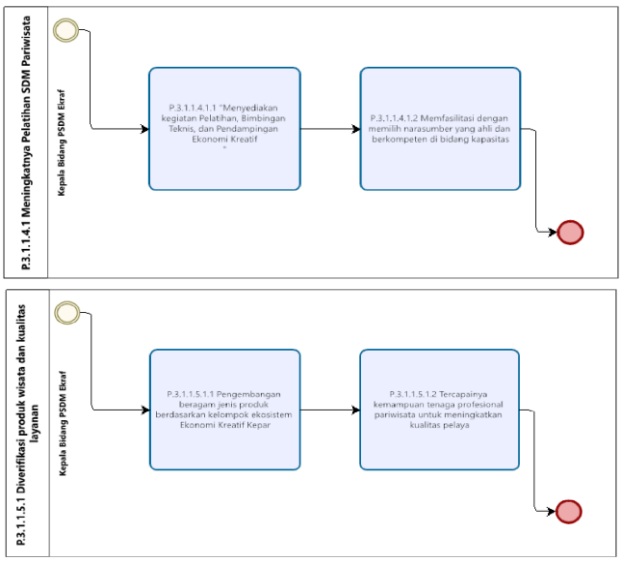

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Pariwisata

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan kepariwisataan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut:

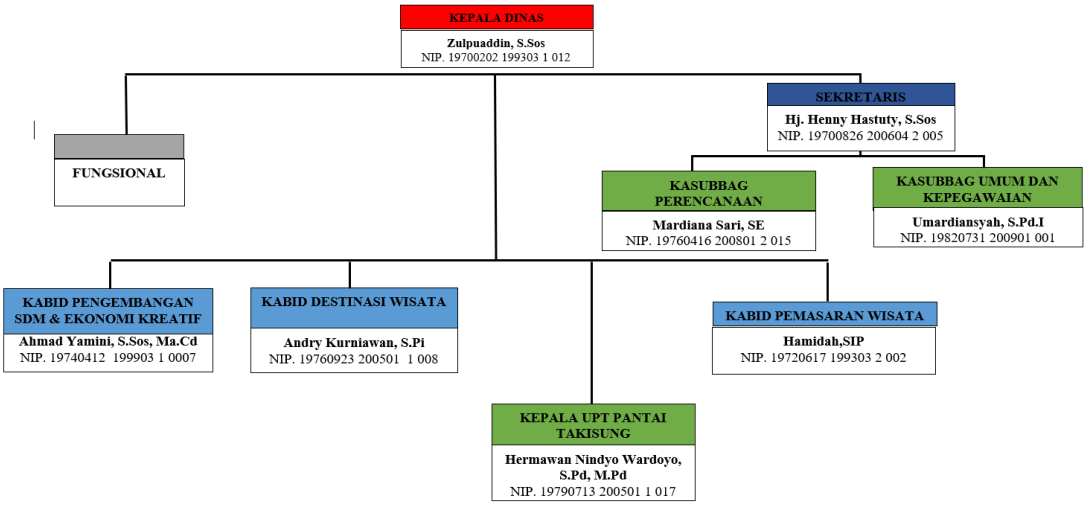

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan kepariwisataan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pariwisata , yakni:

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
      1) perumusan kebijakan teknis Bidang pariwisata;
      2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang pariwisata;
      3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang pariwisata;
      4) pelaksanaan administrasi dinas;
      5) pembinaan UPTD dinas; dan
      6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
   a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas
      1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
      2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran;
      3) administrasi umum dan kepegawaian; dan
      4) ketatausahaan.

   Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
      1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata;
      2) pemberian pelayanan administrasi kepada Bidang lain di lingkungan Dinas Pariwisata;
      3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pariwisata;

4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata;
9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pariwisata tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan

   Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

4. Sub Bagian Keuangan

   Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

6. Bidang Destinasi Pariwisata

a. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan kepariwisataan.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

1) penyusunan Renja Bidang destinasi pariwisata;
2) perumusan kebijakan teknis Bidang destinasi pariwisata;
3) penyusunan perencanaan Daerah tujuan wisata;
4) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan destinasi pariwisata;
5) pelaksanaan pembinaan Daerah tujuan wisata;
6) menginventarisir dan mengidentifikasi potensi-potensi wisata;
7) pelaksanaan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata;
8) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan pariwisata;
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
10) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif pariwisata.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai fungsi:

1) perencanaan operasional kegiatan Bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif pariwisata, pengorganisasian kegiatan bidang kepariwisataan;

2) pengelolaan kegiatan Bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif pariwisata;
3) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif pariwisata; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Bidang Pemasaran Pariwisata
   a. Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas:
      1) merencanakan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kegiatan promosi pariwisata Daerah;
      2) melaksanakan pembinaan pasar wisata;
      3) melaksanakan promosi;
      4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
      5) pelaksanaan promosi pariwisata; dan
      6) pelayanan informasi kepariwisataan.
   b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Wisata mempunyai fungsi:
      1) penyusunan Renja bidang pemasaran pariwisata;
      2) perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata;
      3) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan, pengembangan layanan informasi, promosi dan publikasi pariwisata;
      4) pembinaan, pendidikan dan pelatihan manajemen promosi pariwisata serta penyiapan tenaga teknis kepariwisataan;
      5) pengoordinasian, kerjasama dan fasilitas dengan instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat guna peningkatan kunjungan wisata;
      6) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, pengembangan promosi pariwisata Daerah;
      7) pengumpulan, pengolahan data informasi, penyusunan program kerja, evaluasi serta pelaporan hasil pembinaan dan pengembangan pariwisata, sarana promosi wisata dan pelayanan informasi kepariwisataan;
      8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

9) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dgn PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Stategis
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. (SDM terbatas baik kualitas maupun kuantitas)	Ketergantungan potensi alam yang adaptif	Kenaikan suhu global menyebabkan perubahan cuaca ekstrem, banjir, dan erosi pantai yang dapat merusak destinasi wisata alam	Eksplotasi lingkungan yang berlebihan akan berdampak pada perubahan lingkungan	Kurangnya adaptasi konsep zero waste dan energi terbarukan	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan. (SDM kepariwisataan seperti pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha jasa dll) dan Peningkatan dan Pengembangan personil Dinas Pariwisata
	2. Pengembangan destinasi wisata unggulan kabupaten dan kota belum belum optimal Belum memadainya infrastruktur pendukung pariwisata	Virtual tourism (wisata berbasis pengalaman digital) dapat mengurangi dampak lingkungan	Digitalisasi promosi wisata secara menyeluruh dapat mengurangi dampak lingkungan		Lonjakan wisatawan melebihi kapasitas daya tampung lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem	2. Pembangunan & Pengembangan sarana & prasarana umum fasilitas umum penunjang Pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah
	3. Belum maksimalnya penggalian potensi obyek wisata	Pelaku ekonomi kreatif yang bergantung pada bahan baku alami (kayu, rotan, atau bahan organik) menghadapi keterbatasan sumber daya	Industri kreatif harus dapat beradaptasi dengan permintaan produk ramah lingkungan, handmade, kearifan lokal dan berkelanjutan			3.Pembangunan & Pengembangan Daya Tarik Obyek Wisata untuk meningkatkan Kualitas & Keragaman Produk Pariwisata kreatif, inovatif & terpadu
	4. Kurangnya pemasaran/promosi kepariwisataan					4. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwsata
	5. Belum maksimalnya pendataan kepariwisataan					5. Peningkatan promosi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas serta Pelaksanaan pendataan di sektor kepariwisataan.

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 62 orang yang terdiri dari 32 PNS, 12 PPPK penuh waktu dan 32 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
4	13	7	-	38	**62**	5	13	3	-	3		-	**24**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Pariwisata sesuai peta jabatan adalah 62 (enam puluh dua) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 62 (enam puluh Dua) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Pariwisata dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

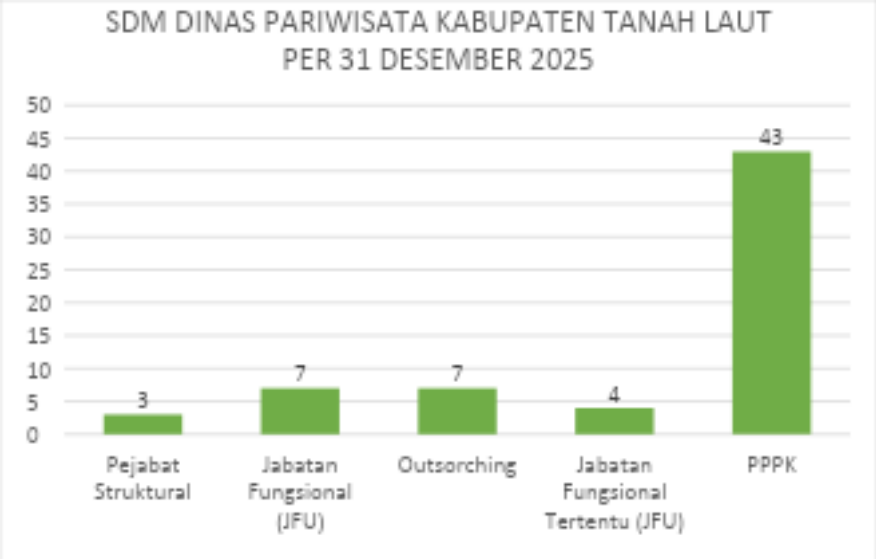

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 3 Pejabat struktural, 7 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 4 orang fungsional umum (JFU), 7 orang Outsorching, 4 Jabatan Fungsional Tertentu (JFU), dan 43 orang PKKK.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 2.015 unit peralatan , 5 unit gedung kantor, 5 mushalla dan 7 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 4 unit kendaraan roda empat, 15 unit kendaraan roda dua dan 5 unit roda tiga.

Program, dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No.	Program, Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.988.662.669**	**9.855.063.908,77**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.997.518	11.997.518,19

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.332.687.654	5.337.108.347,87
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	2.494.304	2.494.304,36
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.884.049	41.884.049,05
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.500.314	1.725.772.622,55
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.209.295	670.477.300,75
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.965.684	1.604.865.416,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.923.850	460.464.350,00
B	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**2.460.273.714**	**5.498.667.708,11**
9	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	461.810.824	1.092.510.823,30
10	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.998.462.891	4.406.156.884,81
C	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.452.272.192**	**4.651.547.803,07**
11	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	1.452.272.192	4.651.547.803,07
D	**PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**80.782.903**	**92.010.423,77**
12	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	80.782.903	92.010.423,77
E	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER**	**1.119.244.275**	**1.149.514.272,95**

	DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
13	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.055.232.163	1.085.502.160,95
14	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	64.012.112	64.012.112,00

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/229/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 8 (Delapan) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menyusun Pohon kinerja yang memuat crosscutting antar bidang/skpd.	Telah dilaksanakan penyusunan pohon kinerja yang memuat keras cutting antar bidang SKPD	2026	2025	Dinas Pariwisata	Dilaksanakan pada bulan september 2025
2	Formulasi perhitungan pada dokumen IKU agar dipastikan lagi kesesuain dengan rumusan kinerja yang ingin dicapai sehingga releven untuk mengukur kinerja.	Telah dilaksanakan konsultasi dengan badan pendapatan daerah dan baperida bahwa formulasi perhitungan telah sesuai sesuai dengan relevensi pengukuran kinerja yang akan di capai	2026	2025	Dinas Pariwisata	Dilaksanakan Pada bulan sepotember 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Bahwa pemantauan kinerja melalui aplikasi e-kinerja telah diimpelementasikan dengan memberikan umpan balik dari pimpinan yang sebelumnya hanya dengan simbol jempol dan sekarang dilakukan feedback narasi dari atasan sehingga kinerja dapat tercapai dengan maksimal	2026	2025	Dinas pariwisata	Dilaksanakan pada penilaian Ekinerja bulan September 2025
4	Terkait masih adanya kesalahan didalam penyajian pada dokumen lapkin sebelumnya agar kedepanya dilakukan reviu terhadap dokumen lapkin secara lebih mendalam.	Telah dilakukan review terhadap laporan kinerja untuk tindak lanjut hasil evaluasi ini revieu dilakukan kepada laporan kinerja triwulan 3 tahun 2025	2026	2025	Dinas Pariwisata	Akan dilaksanakan pada Bulan oktober 2026
5	Dokumen laporan kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tersebut agar memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya.	Pada Laporan kinerja tahun 2025 yang akan datang laporan kinerja akan menginformasikan tentang perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagai perbandingan dan kesinambungan dari tahun sebelumnya	2026	2026		Akan dilaksanakan pada bulan januari 2026 padasaat penyusunan laporan kinerja tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
6	Dokumen laporan kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan daerah lain tersebut agar disempurnakan dengan disajikan nya analisis terkait perbandinganya.	Pada laporan kinerja tahun 2025 akan dilakukan analisis terkait perbandingan realisasi kineja dengan realisasi kinerja di level nasional yaitu berupa realisasi kinerja dengan daerah analisis terkait perbandinganya	2026	2026		Akan dilaksanakan pada bulsn januari 2026 pada saat penyusunan tahun 2025
7	Dokumen laporan kinerja agar memuat analisis efesiensi sumber daya (target realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran.	Pada dokumen laporan kinerja tahun 2025 akan menginfokan tentang efesiensi atas penggunaan suber daya dalam mencapai kinerja dan memuat analisisnya	2026	2026		Akan dilaksanakan pada bulan januari 2026 pada saat penyusunan laporan kinerja tahun 2025
8	Agar menyusun dokumen akuntabilitas kinerja dinas Pariwisata menjadi kepedulian seluruh pegawai sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga penyusun dapat dilakukan secara tepat waktu per tahapan prosesnya sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai.	Pada penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dinas pariwisata dilakukan secara tepat waktu tahapan proses sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai	2026	2026		Akan dilaksanakan pada bulan januari 2026 pada saat penyusunan laporan kinerja tahun 2025

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Pariwisata Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Pariwisata bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pariwisata .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Dinas Pariwisata diharapkan mampu untuk mewujutkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta target sasaran pembangunan Nasional. Dengan dukungan yang cepat, responsif dan akurat, Dinas Pariwisata dapat memberikan daya dukung yang kuat bagi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dinas Pariwisata Hal ini pada akhirnya akan mendorong seluruh proses pembangunan daerah agar berjalan tertib, aspiratif dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Dinas Pariwisata menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka

menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata termasuk dalam mendukung tujuan kedua yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah adalah Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata).

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pariwisata menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Pariwisata adalah Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) dan sasaran strategis Dinas Pariwisata adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,49	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
	1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata (%)	10	10	10	10	10	10
	2.	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata (%)	5	10	10	10	10	10

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata (%)	PAD Pariwisata Tahun N - (N-1) / N-1 x 100%
2.	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata (%)	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang bersertifikasi / jumlah seluruh pelaku ekonomi kreatif x 100%

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah	Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata	Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

		Peningkatan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan wisata	Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	

No	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1.	Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata	Pengembangan strategi promosi wisata berbasis digital.	
2.		Peningkatan Kemitraan masyarakat dalam pengelolaan wisata	Peningkatan sarana prasarana yang representative pendukung kepariwisataan pariwisata. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan	
			Peningkatan promosi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas serta Pelaksanaan pendataan di sektor kepariwisataan	
			Penggalian potensi untuk dijadikan Destinasi pariwisata	
			Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata (%)	10	Kepala Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	1	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata (%)	10	Kepala Dinas Pariwisata

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Dinas Pariwisata didukung dengan dengan APBD

sebesar Rp. 21.246.804.116,67. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.498.667.708,11
		Program Pemasaran Pariwisata	4.651.547.803,07
2	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92.010.423,77
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.149.514.272,95
		JUMLAH	11.391.740.207,90

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 139,4%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata (%)	10	12,26%	122,6%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	1	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata (%)	10	15,62%	156,2%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						139,4%	Sangat tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Pariwisata telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut

lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN		RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*		**Realisasi** **---------- X 100%** **Target**
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.		

Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	**Target** **---------- X 100%** **Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan**	Rasio PDRB Akomodasi dan	Persen	1,5

	Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Makan Minum (Pariwisata)		

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	58,4	30,17%	39,04%	10	12,26%	122,6%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									122,6%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	10	12.26	12.26	10	2,5%

Capaian Kinerja Terhadap Provinsi

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Provinsi
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor	Persentase Peningkatan	%	105,09

	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PAD Sektor Pariwisata		

a. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata adalah besaran persentase kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi PAD sektor pariwisata pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan, pengembangan, dan optimalisasi potensi pariwisata daerah. Untuk memperoleh Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata} = \frac{\text{PAD Sektor Pariwisata tahun n - PAD Sektor Pariwisata tahun (n-1)}}{\text{PAD Sektor Pariwisata tahun (n-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan PAD Sektor Pariwisata 12,26 \%} = \frac{1.945.290.000,00 - 1.732.835.000}{1.732.835.000} \times 100\%$$

Tahun 2025 tarcapai 12,26% dari target pertumbuhan sektor PAD sebesar 10%. Dengan perhitungan yaitu Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu sebesar Rp. 1.732.835.000,- dan di Tahun 2025 sebesar Rp. 1.945.294.000,- di perhitungkan pertumbuhan pada Tahun 2025 sebesar 12.26% melebihi dari target yang telah ditentukan. Retibusi Daerah ini terdiri dari Retribusi Pemanfataan Aset Daerah (Rest Area, Minta Tirta, Pantai Takisung dan Pantai Batakan) dan Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga berupa karcis masuk Obyek Wisata (Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin). Dari Keselurauhan jumlah data kunjungan wisatawan sebesar 583,973 orang. Realisasi kunjungan wisatawan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah sebanyak 197,782 orang dan kunjungan wisatawan di objek wisata yg dikelola oleh swasta/Desa/Perorangan sebanyak 386,191 orang.

Grafik 3.1.2

Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2021 – 2025

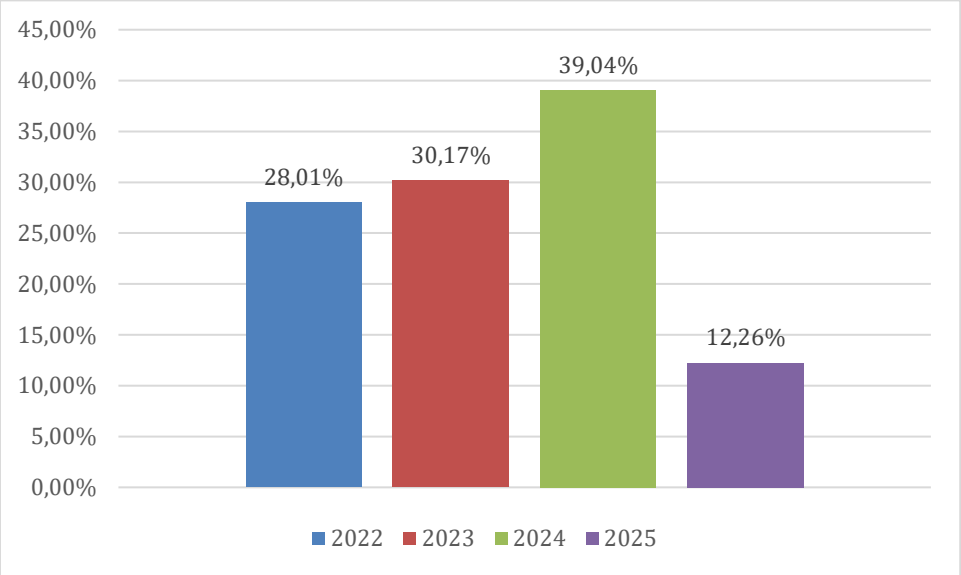

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan Data Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika kinerja yang berfluktuasi. Pada tahun 2022 realisasi PAD tercatat sebesar Rp957.349.000 dengan capaian 28,01%, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp1.246.250.000 dengan capaian 30,17%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp1.732.835.000 dan capaian 39,04%, yang mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan potensi objek wisata serta pemulihan aktivitas pariwisata daerah. Selanjutnya pada tahun 2025 realisasi PAD kembali meningkat secara nominal menjadi Rp1.945.290.000, namun persentase capaian menurun menjadi 12,26% akibat adanya peningkatan target atau faktor lain yang mempengaruhi perbandingan capaian terhadap target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan riil terus bertumbuh, diperlukan strategi optimalisasi pengelolaan pendapatan dan penyesuaian target yang lebih proporsional agar kinerja PAD sektor pariwisata dapat tercermin lebih efektif dan berkelanjutan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan tahun 2025, capaian indikator pada Dinas Pariwisata menunjukkan tren yang melampaui target tahunan serta

mendukung pencapaian sasaran jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Pada sasaran meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, realisasi persentase peningkatan PAD sektor pariwisata mencapai 12,26%, melampaui target kinerja tahun 2025 sebesar 10%. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, serta penguatan subsektor ekonomi kreatif telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya kemajuan usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata, realisasi capaian mencapai 15,62%, juga melampaui target tahun 2025 sebesar 10%. Kinerja tersebut mencerminkan semakin berkembangnya pelaku ekonomi kreatif, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta semakin luasnya pemanfaatan pemasaran dan inovasi berbasis kreativitas dalam mendukung ekosistem pariwisata daerah.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2025–2029 dalam dokumen perencanaan strategis, arah capaian kinerja tahun berjalan telah selaras dengan indikator makro pembangunan pariwisata, antara lain peningkatan persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual yang ditargetkan meningkat secara bertahap dari 1,25% pada tahun 2025 menjadi 2,5% pada tahun 2029, serta pertumbuhan investasi penyediaan akomodasi, makan dan minum yang ditargetkan naik secara bertahap dari 2,85% pada tahun 2025 menjadi 2,96% pada tahun 2029. Selain itu, indikator pertumbuhan tamu wisatawan asing juga diproyeksikan mengalami pemulihan dan peningkatan bertahap hingga 0,7% pada tahun 2029.

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pencapaian sasaran strategis jangka menengah. Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berada pada jalur yang tepat (on track) dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Provinsi

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mencapai 122,6%, melampaui capaian tingkat Provinsi yang sebesar 105,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tidak hanya berhasil melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga berada di atas rata-rata capaian Provinsi, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalnya pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata “Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, Dinas Pariwisata melaksanakan.

a. Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan

1. Perancangan dan perencanaan pengembangan daya Tarik wisata unggulan Kegiatan ini berupa pembuatan Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata Unggulan Kabupaten/Kota yaitu :

• Pembuatan dokumen RIPKD

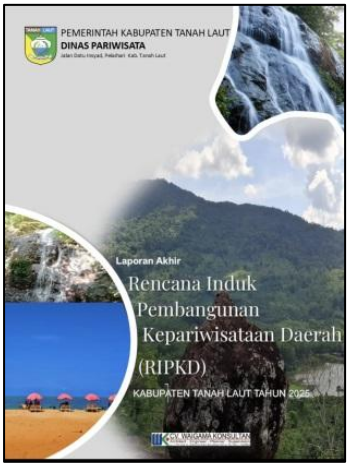

• Kajian geopak meratus pulau datu Desa Tanjung dewa

• Masterplan Gunung Kayangan

• Masterplan Batakan Baru

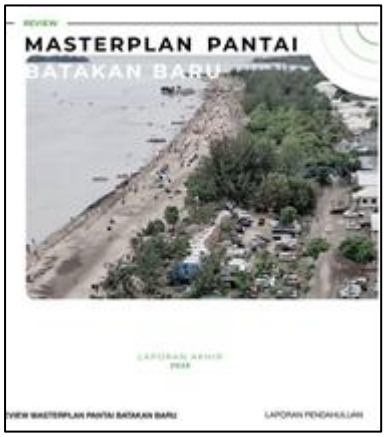

2. Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata

a) Objek Wisata yang dikelola Pemerintah

Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemerintah. Pada tahun 2025 jumlah objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut sebanyak 7 objek yang terdiri dari tiga objek penghasil pendapatan asli daerah dan 4 objek yang tidak ada pendapatan asli daerah.

Jumlah Kunjungan Wisatawan yang di kelola Pemerintah sd Bulan September Tahun 2025 sebanyak 171.665 Orang.

Adapun objek wisata adalah sebagai berikut :

- Obyek Wisata Gunung Kayangan

  Gunung Kayangan Adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tanah Laut. Gunung Kayangan terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari, kurang lebih 6 km dari kota Pelaihari dengan Luas 17 Ha. Dari lokasi ini bisa melihat jelas hamparan kebun sawit yang menghijau dan bisa melihat laut biru dikejauhan. Di Gunung Kayangan juga banyak terdapat monyet yang cukup jinak dan bisa diajak bermain dengan para pengunjung.

- Obyek Wisata Taman Mina Tirta

  Taman Mina Tirta terletak ditengah kota Pelaihari Dengan Luas1 Ha. Tempatnya yang bersih, nyaman, fasilitas yang lengkap dan mudah dijangkau menjadikannya favorit masyarakat Pelaihari dan sekitarnya. Di Taman ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan, selain sekedar duduk santai dan bercengkerama bersama keluarga masyarakt juga bisa menikmati sepeda air yang terdapat disana.

- Obyek Wisata Air Terjun Bajuin

  Air terjun Bajuin terletak di kecamatan Bajuin berjarak kurang lebih 10 km dari Kota Pelaihari dengan Luas 20 Ha. Air terjun Bajuin memiliki panorama yang sangat indah dan eksotik. Udara disekitarnya juga sangat sejuk karena suasana alamnya masih sangat asli dan terjadi dan masih banyak ditemui anggrek spesies endemik meratus disekitarnya.

  Keasrian alamnya dengan panorama pegunungan dan pepohonan yang menghijau berpadu dengan indahnya air terjun.

- Obyek Wisata Pantai Takisung

  Pantai Takisung terletak di Kecamatan Takisung dengan jarak tempuh sekitar 22 KM dari Kota Pelaihari dengan luas 4 Ha.

  Selain pemandangan yang indah di Pantai tersebut para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas banana boat, permainan ATV, penginapan dan aneka kuliner yang dijual oleh pedagang di lokasi tersebut. Pantai Takisung juga menjadi lokasi penyelenggaraan

Festival Layang-layang yang telah menjadi event tahunan Kabupaten Tanah Laut.

- Obyek Wisata Pantai Batu Lima

  Pantai Batu Lima berada di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung sekitar 35 km dari kota Pelaihari. Kawasan pantai ini cukup luas sekitar 70 HA, dengan fasilitas Cottage yang bisa di sewa sebanyak 18 buah dan di lengkapi dengan taman bermain anak - anak serta terdapat juga Shelter untuk tempat bersantai di tepi pantai dengan pemandangan Batu sebanyak Lima Buah di bibir pantai sebagai sebuah legenda.

- Obyek Wisata Pantai Swarangan

  Pantai Swarangan terletak di Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Suasana yang sangat tenang di pantai ini sangat cocok bagi anda yang ingin menikmati pantai secara private. Pantai Swarangan menawarkan pemandangan yang indah dan tidak kalah dibandingkan dengan pantai lainnya.

- Obyek Wisata Pantai Batakan Baru

  Pantai Batakan berada di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan dengan jarak sekitar 40 km dari kota Pelaihari. Pantai yang panjang dan landau membuat para pengunjung leluasa melakukan aktifitas disana. Di Pantai Batakan jua terdapat beragam fasilitas untuk memudakan para pengunjung seperti kamar mandi, toilet, beragam permainan seperti banana boat, ATV, dll.

b) Objek Wisata yang dikelola Swasta

Obyek Wisata yang dikelola Swasta di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 5 Obyek Wisata Buatan, 14 Obyek Wisata Alami dan 1 Obyek Wisata Religi.

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata yang dikelola swasta sd Bulan September sebanyak 304.035 Orang.

Adapun objek wisata adalah sebagai berikut :

- Obyek Wisata Pantai Tanjung Dewa

  Pantai Tanjung Dewa berlokasi di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan. Pantai Tanjung Dewa atau yang lebih dikenal masyarakat sekitar dengan nama Pantai Labuan adalah salah satu pantai yang

unik dan memiliki panorama yang sangat indah. Di Pantai ini juga banyak terdapat batu yang sangat cocok dijadikan untuk spot foto. Di lokasi ini juga menjadi titik penyeberangan untuk wisata religi ke Pulau Datu.

- Obyek Wisata Susur Sungai Panjaratan

  Wisata Susur Sungai Paniaratan sangat dianjurkan bagi anda yang masih ingin menikmati alam dengan sara "kelotok" atau "sampan" dan ingin melihat secara langsung bekantan di habitat aslinya. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis Larvatus adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus tunggal monyet Nasalis. Apabila anda ingit melihat dan bercengkerama langsung dengan para bekantan datanglah pada pagi hari antara pukul 06.00 s.s 07.00 atau sore hari pukul 17.00 sd 18.00 karena bekantan ini terkenal sangat pemalu sehingga jika ingin mendapatkan momen yang pas datanglah pada waktu yang ditentukan Dan Juga Merupakan Kawasan Ekonomi Esensial dengan Luasan 25 Ha.

- Obyek Wisata Gunung Birah

  Gunung Birah terletak di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan. Pemandangan dari puncak Gunung Birah sangat spektakuler pengunjung bisa melihat secara langsung perpaduan panorama pegunungan dan panorama pantai yang indah. Udara yang sangat sejuk dan nyaman terasa apabila kita berada di lokasi puncak Gunung Birah, dengan area yang luas menjadikan tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi fun camping.

- Obyek Wisata Pantai Turki

  Pantai Turki terletak di Desa Swarangan Dusun Tungkaran Naik Kecamatan Jorong. Pantai ini merupakan salah satu destinasi baru yang ada di Tanah Laut. Pantai Turki cukup menjadi favorit bagi penggemar wisata bahari. Fasilitas yang lengkap seperti kamar mandi, toilet, mushola dan aneka permainan seperti banan boat, jet ski, dan sebagainya.

- Obyek Wisata Pantai Asmara

Pantai Asmara terletak di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong dengan jarak tempuh kurang lebih dari 50 km dari Kota Pelaihari. Pantai ini cukup menjadi primadona bagi masyarakat sekitar Tanah Laut.

- Obyek Wisata Gunung Timah

  Gunung Timah berlokasi di Kecamatan Panyipatan dan salah satu wisata baru yang menarik di Tanah Laut. Jika pengunjung naik ke atas puncaknya maka mereka bisa melihat hamparan laut di kejauhan berpadu dengan hijaunya pegunungan. Untuk sampai ke puncak pengunjung tidak perlu khawatir untuk memanjat karena telah disediakan jalan agar lebih mudah mendaki keatas.
- Obyek Wisata Pantai Kintap

  Salah satu objek wisata terkenal yang berasal dari Kalimantan Selatan adalah objek wisata Pantai Muara Kintap. Pantai Muara Kintap merupakan objek wisata baru dari Kalimantan Selatan yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Objek wisata tersebut baru diresmikan dan dikenal oleh wisatawan pada tahun 2016.
- Obyek Wisata Pantai Cemara 1 dan 2

  Pantai Cemara terletak di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Pantai ini diberi nama Pantai Cemara karena di Pantai ini banyak ditumbuhi Pohon Cemara.
- Obyek Wisata Pantai Rindang Piungan
- Obyek Wisata Pulau Datu
- Obyek Wisata Kerbau Rawa

  Kerbau Rawa Bati-Bati menawarkan pemandangan savana rumput hijau sejauh mata memandang. Dengan luas 250 hektar, tempat ini dihuni kurang lebih 300 ekor kerbau milik warga. Tidak heran, di desa ini aktivitas menggembala kerbau sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Di desa ini ada 14 peternak kerbau dan mereka memiliki jadwal tersendiri yang bergantian.
- Obyek Wisata Mangroove Pagatan Besar
- Obyek Wisata Dewa Katar
- Obyek Wisata Mahuni

- Obyek Wisata Pantai karindangan
- Obyek Wisata Taman Hijau Rindang
- Obyek Wisata Pantai Tabunio
- Obyek Wisata Taman Permana
- Obyek Wisata Pantai Borneo Beach

3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Pada Tahun 2025.

- Sarana dan prasarana pada objek wisata banyak yang mengalami kerusakan dan diperlukan sarana prasarana yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.
- Volume sampah di destinasi wisata pantai (seperti Batakan dan Takisung) saat peak season (hari libur nasional) seringkali melebihi kapasitas penanganan, sehingga mengganggu estetika.
- Belum meratanya kemampuan manajerial Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mengelola desa wisata secara mandiri dan profesional. Sebagian masih sangat bergantung pada arahan dinas teknis.
- Masih adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk karena sistem pemungutan yang belum sepenuhnya digital (e-ticketing) di semua pos retribusi.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk promosi belum terintegrasi secara maksimal dalam satu ekosistem *smart tourism*. Promosi masih cenderung parsial.

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan operasional objek wisata unggulan di Kabupaten Tanah Laut agar tetap menjadi tujuan wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, diharapkan daya tarik destinasi wisata dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

keberlanjutan dan kualitas sarana prasarana pariwisata yang terjaga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar destinasi wisata serta berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sektor pariwisata. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki peran strategis tidak hanya dalam pemulihan pascabencana, tetapi juga dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan

beberapa kegiatan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana di objek wisata selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan gedung etalase ekraf objek wisata pantai batakan baru

2) Pembangunan Cottage objek wisata pantai Batakan Baru

3) Rehabilitasi musholla objek wisata pantai batakan baru

4) Pembangunan paving blok objek wisata pantai batakan baru

5) Pembangunan pos pengamanan terpadu objek wisata batakan baru

6) Rehabilitasi tugu palagan batakan

7) Pemasangan paving blok depan foodcourd objek wisata bajuin

8) Pembangunan musholla objek wisata bajuin

9) Rehabilitasi foodcourd objek wisata bajuin

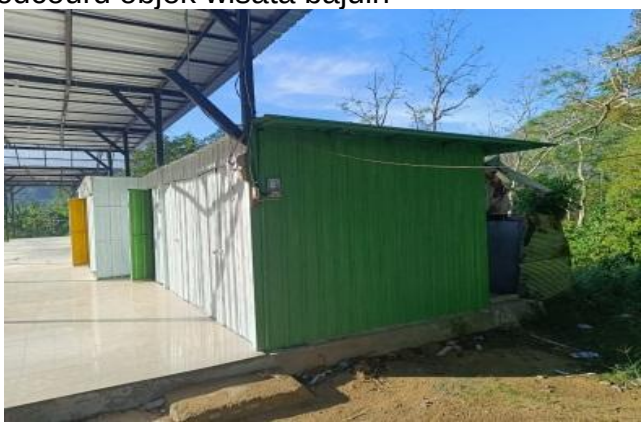

10) Pembuatan spot foto/selfi objek wisata pantai takisung

11) Rehabilitasi panggung objek wisata pantai takisung

12) Pembangunan Lahan Parkir Menara Pantau Objek Wisata Gunung Kayangan

13) Pemeliharaan taman orchid

14) Rehabilitasi sangkar burung taman orchid

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi

1) Event Jambore Pokdarwis di Obyek Wisata yang dilaksanakan pada tanggal 07 sd 08 Oktober 2025 di Pantai Batakan Baru. Berkumpulnya seluruh Kelompok Sadar Wisata se Kabupaten Tanah Laut yang menjadi ajang bertukar ide, berbagi pengalaman serta mempekuat sinergi antar Pokdarwis dalam upaya membangun pariwisata daerah yangn berkelanjutan, kreatif dan berbasis kearifan local.

b. Peningkatan Kunjungan Wisatawan

1. Pelaksanaan promosi wisata.

Program Peningkatan Kunjungan Wisatawan dilaksanakan melalui strategi promosi terpadu, penguatan daya tarik destinasi, penyelenggaraan event pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendukung guna memberikan pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Program ini juga didukung dengan pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan paket wisata yang inovatif, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan nusantara maupun mancanegara serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata

Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata dilaksanakan sebagai upaya mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta promosi destinasi secara efektif melalui pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data kepariwisataan yang akurat dan terintegrasi. Informasi tersebut disebarluaskan melalui berbagai media, baik digital maupun non-digital, sehingga dapat diakses oleh masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan sebagai referensi dalam mengenal potensi destinasi, kegiatan pariwisata, serta layanan pendukung lainnya, guna meningkatkan kunjungan dan pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Berikut penjabaran penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata :

1) Cetak Buku Profil Pariwisata

2) Pembuatan New Jingle Fantastic tanah laut

Bisa diakses pada link berikut https://drive.google.com/folderview?id=1FVgCzeaYpxvuXTe9Oh5F_vkoAaZIV6s-

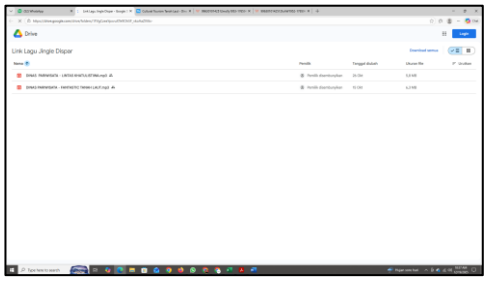

3) Aplikasi Sistem Promosi Wisata

Merupakan Aplikasi Cultural Tourism Tanah Laut

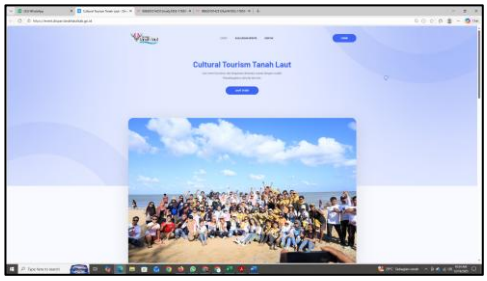

3. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri

Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri dilaksanakan melalui berbagai upaya strategis untuk meningkatkan promosi dan daya tarik destinasi, antara lain partisipasi dalam pameran dan event pariwisata, penyelenggaraan promosi terpadu, penguatan kerja sama dengan pelaku industri perjalanan, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi yang efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi destinasi, budaya, dan produk unggulan daerah kepada wisatawan nusantara dan mancanegara, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas jaringan pemasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan. Penjabarannya dapat di lihat pada poin Peningkatan Kunjungan Wisatawan.

Berikut penjabaran pelaksanaan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri:

1) Launching COE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026

Kegiatan ini dilaksanakan di Qmall Banjarbaru pada Tanggal 25 Oktober 2025. Kegiatan launching ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata dan agenda menarik yang akan digelar sepanjang tahun 2026.

2) Festival Budaya Pasar Terapung & Pameran Launching COE

Pameran Festival Wisata Budaya Pasar Terapung di Banjarmasin pada tanggal 8 sd 11 Agustus 2025 dan juga Pameran Wisata dalam rangka Launching COE Provinsi Kalsel di Yogyakarta tanggal 13 sd 14 November 2025.

3) Dekorasi Stand Pameran

- Pameran Festival Wisata Budaya Pasar Terapung di Banjarmasin pada tanggal 8 sd 11 Agustus 2025
- Pameran Wisata dalam rangka Launching COE Provinsi Kalsel di Yogyakarta tanggal 13 sd 14 November 2025.

- Dekor Stand Ekonomi Kreatif (Galyna Heiwa) di Batakan Baru dalam rangka Pemilihan Putpar 2025.
    - Dekor Stand Ekonomi Kreatif (The Nail Art Studio) di Batakan Baru dalam rangka Pemilihan Putpar 2025
    - Dekor Stand dalam rangka Launching COE Kabupaten Tanah Laut di Qmall Banjarbaru.

4) Posko Fantastic Tanah Laut

4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri

   Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pariwisata di dalam dan luar negeri dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengembangan destinasi, meningkatkan promosi, serta memperluas akses pasar pariwisata daerah melalui sinergi dengan pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan mitra internasional. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi dan promosi, pengembangan paket wisata terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dalam penyelenggaraan event dan investasi pariwisata. Melalui kemitraan yang berkelanjutan, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata yang lebih kompetitif, inovatif, dan mampu menarik kunjungan wisatawan secara signifikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut penjabaran pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri :

1) Ramadhan Expo Tahun 2025

Kegiatan di selenggarakan di sepanjang Jalan H. Boedjasin Pelaihari dilaksanakan pada Tanggal 02 Maret 2025. Kegiatan yang digelar di Kabupaten Tanah Laut ini menghadirkan 145 stand, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 83 stand.

2) Festival Batakan Colourfun

Kegiatan Festival Batakan Colour Fun Tahun 2025 diselenggarakan di Pantai Batakan Baru Tanggal 20 sd 21 September 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk promosi untuk meningkatkan pengunjung wisatawan, meningkatkan promosi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat disekitar Obyek Wisata.

3) Gowes Wisata wisata

Event Gowes Wisata diselenggarakan sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui kegiatan olahraga rekreasi yang sehat, ramah lingkungan, dan partisipatif. Dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2025 bertempat di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

4) Pertunjukan Live music Mingguan

dilaksanakan sebagai upaya promosi pariwisata dengan menghadirkan hiburan rutin di kawasan destinasi guna menciptakan suasana yang lebih hidup dan menarik minat kunjungan wisatawan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi musisi lokal dan pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi.

5) Festival Layang-layang

Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Batakan Baru pada tanggal 30 sd 31 Agustus Tahun 2025. Menampilkan beragam layang-layang eksibisi dan ratusan layang-layang dandang khas Kalimantan Selatan. Tercatat 900 layang-layang ikut serta dalam festival ini, dengan peserta tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, tetapi juga provinsi lain seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Lebih istimewa lagi, turis mancanegara dari Prancis, Singapura, dan Malaysia turut hadir memeriahkan suasana. Event ini pun mendapat penghargaan dari rekor Muri.

6) Lomba klotok/ kapal kecil

Dilaksanakan pada tanggal 30 November 2025 dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

7) Lomba Cipta Lagu

Dilaksanakan pada Tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

8) Pertunjukan Live music Keg Porprof

Dilaksanakan Bulan Oktober rangka memeriahkan Porprof di Kabupaten Tanah Laut.

9) Pertunjukan hiburan Event besar di Obyek Wisata (live music)

Dilaksanakan di Pantai Batakan Baru Tanggal 19 Oktober 2025. Dengan adanya pertunjukan live music dapat meningkatkan daya tarik destnasi wisata sebagai bentuk Promosi pariwisata atau pertunjukan seni musik di alam terbuka dapat menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi Obyek Wisata Kabupaten Tanah Laut.

10) Lomba Lomba Menyanyi Lagu Perjuangan

Kegiatan ini dalam rangka merayakan HUT RI ke 80 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di exs Terminal Pelaihari.

11) Lomba Foto Wisata

Dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2025 dalam rangka memeriahkan hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Mendorong atau mengoptimalkan Platform Digital yang mengintregasikan informasi rute, harga tiket, kalender even, hingga direktori UMKM lokal.
2. Mendorong sertifikasi bagi pemandu wisata lokal dan pengelola kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
3. Melatih aparatur dinas dalam manajemen manjemen resiko bencana di area wisata (Terutama Pantai) dan standar pelayanan prima.
4. Memastikan toilet, musola, dan area parkir di destinasi unggulan memenuhi standar kebersihan internasional.
5. Menjadikan desa wisata sebagai unit ekonomi mandiri melalui pendampingan intensif melalui penguatan pokdarwis.
6. Mewajibkan setiap destinasi wisata memiliki ekonomi kreatip untuk produk unggulan lokal (sasirangan, kerupuk ikan, kerajinan tangan)

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Sarana dan prasarana pada objek wisata banyak yang mengalami kerusakan dan diperlukan sarana prasarana yang bisa meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.
2. Volume sampah di destinasi wisata pantai (seperti Batakan dan Takisung) saat peak season (hari libur nasional) seringkali melebihi kapasitas penanganan, sehingga mengganggu estetika.
3. Belum meratanya kemampuan manajerial Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mengelola desa wisata secara mandiri dan profesional. Sebagian masih sangat bergantung pada arahan dinas teknis.
4. Masih adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk karena sistem pemungutan yang belum sepenuhnya digital (e-ticketing) di semua pos retribusi.

5. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk promosi belum terintegrasi secara maksimal dalam satu ekosistem *smart tourism*. Promosi masih cenderung parsial.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang rusak menggunakan alokasi dana operasional yang tersedia secara efektif .
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) untuk penyediaan armada angkut sampah ekstra khusus pada momen libur lebaran dan tahun baru .
3. Peningkatan Kapasitas & Kemandirian POKDARWIS.
4. Peningkatan realisasi PAD dan tersedianya laporan keuangan secara Digitalisasi Sistem Retribusi Pariwisata yang *real-time* serta transparan.
5. Aktif mengikuti pameran pariwisata di tingkat provinsi maupun nasional untuk memperkenalkan potensi daerah.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata

Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Pembanding Capaian Kinerja Terhadap Target 2025 dengan 2024

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	TAHUN 2025		
				TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	%	25,3 %	10	15,62 %	156,2%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025							156,2%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	%	10	15,62	156	10	0,16

a. Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata

Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan kualitas dan daya saing pelaku usaha ekonomi kreatif yang terkait dengan sektor pariwisata, yang ditunjukkan melalui jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi dibandingkan

dengan total seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif. Untuk memperoleh Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang bersertifikasi}}{\text{jumlah seluruh pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$$

Tabel 3.4

Tabel Perbandingan Data Pelaku Usaha EKRAF 2024 dan 2025

NO	Tahun Produk Ekraf	Sudah Memiliki HKI	Masih Proses HKI	Belum Memiliki HKI	Jumlah
1.	2024	32	0	201	233
2.	2025	37	0	196	233

Grafik 3.1.2

Tabel Perbandingan Data Pelaku Usaha EKRAF 2024 dan 2025

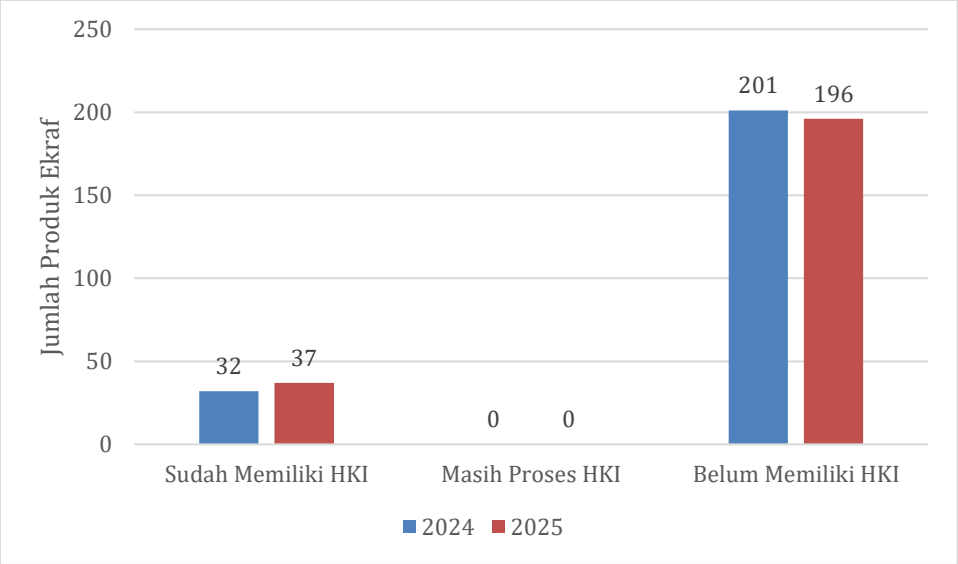

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan data Tahun 2024 dan 2025, jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif tercatat relatif stabil, yaitu sebanyak 233 pelaku usaha pada kedua tahun tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan jumlah usaha secara signifikan, namun kinerja lebih diarahkan pada penguatan kualitas usaha yang sudah ada.

Dilihat dari aspek kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu dari 35 usaha pada Tahun 2024 menjadi 37 usaha pada Tahun 2025. Sementara itu, jumlah usaha yang belum memiliki HKI mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembinaan dan legalitas usaha, meskipun masih perlu ditingkatkan.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja tahun 2025 mencatat sebanyak 233 produk ekonomi kreatif yang telah terdata, terdiri dari 37 produk memiliki HKI dan 196 produk belum memiliki HKI. Sebaran usaha masih didominasi subsektor kuliner, sedangkan subsektor lainnya berkembang dalam skala terbatas.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif telah berjalan dan membentuk basis data serta fondasi pelaku usaha. Namun, dari sisi kualitas, legalitas usaha (HKI), dan diversifikasi subsektor masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan sasaran peningkatan daya saing dan nilai tambah ekonomi kreatif.

Dengan demikian, capaian tahun berjalan dapat dinilai menuju target (on track), tetapi memerlukan penguatan melalui fasilitasi HKI, pembinaan kualitas produk, dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif lainnya untuk memastikan target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata “Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata”, Dinas Pariwisata melaksanakan.

a. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata

1. Pelatihan SDM Pariwisata

a. Pelatihan Pembuatan Konten Bagi Pelaku Usaha Kreatif Parkraf 2025

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif (Parkraf) dalam menghadapi perkembangan pemasaran digital yang semakin kompetitif. Pelatihan difokuskan pada penguatan kemampuan peserta dalam merancang, memproduksi, dan mendistribusikan konten promosi yang menarik, informatif, dan sesuai dengan karakteristik pasar digital.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam membuat konten kreatif berbasis foto, video, dan narasi promosi, serta memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana pemasaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan pelaku usaha mampu memperluas jangkauan promosi, meningkatkan daya saing produk/jasa, serta mendorong pertumbuhan kunjungan dan transaksi ekonomi kreatif.

b. Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Parekraf

Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2025 dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Algoritma Café & Resto, Jl. KH. Mansyur, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang pelaku usaha ekonomi kreatif. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi pemasaran digital agar peserta mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memasarkan produk atau jasa secara lebih efektif dan berdaya saing.

c. Studi Kaji Tiru ke Dekranasda Banjarmasin

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025 yang di ikuti sebanyak 95 org terdiri dari IKM se Kabupaten Tanah Laut dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif . Tujuan Kegiatan tersebut di antaranya untuk menggali referensi dan strategi aplikatif dari Dekranasda Kota Banjarmasin terkait pengembangan sektor kerajinan khas daerah, guna meningkatkan daya saing UMKM di daerah kami melalui inovasi produk, efektivitas promosi, dan penguatan kemitraan strategis.

2. Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif

a) Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan

Waktu pelaksanaan Kamis, 15 Mei 2025 bertempat di Janggala Coffee House Jl. Raya Matah (Depan RS Bersalin Ainun). Jumlah peserta Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebanyak 20 orang yang berasal dari Kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Tujuan Kegiatan Pelatihan Penggalian Potensi Ekonomi Kreatif Pedesaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Mengurangi ketergantungan pada pertanian konvensional, Membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda, Melestarikan budaya dan tradisi lokal serta Mengurangi urbanisasi dengan menyediakan peluang usaha di desa melalui BumDesa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

b) Pelatihan Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Waktu pelaksanaan Kamis, 12 Juni 2025 bertempat Sinar Hotel Pelaihari Jl. KH. Mansyur No.10, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jumlah peserta Pelatihan Kuliner Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2025 sebanyak 25 orang yang berasal dari Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut.

c) Kegiatan Fantastic Creative Festival

Kegiatan Fantastic Creative Festival ini akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu Hari Jumat - Sabtu Tanggal 24 s.d. 25 Oktober 2025 bertempat di kawasan Jl. H. Boejasin Pelaihari (Pal-Palan). Fantastic Creative Festival, adalah festival yang menggabungkan berbagai unsur kreativitas seperti seni pertunjukan, pameran / bazaar karya dan inovasi, kompetisi, hingga hiburan interaktif. Tujuan di selenggarakan acara tersebut di antaranya :

- Fantastic Creative Festival merupakan sebuah wadah yang mampu menyalurkan potensi sekaligus menjadi sarana hiburan, edukasi, serta apresiasi dan inovasi dalam berkarya.
- Acara ini diharapkan mampu menjadi sarana kebersamaan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni, pengembangan eknomi kreatif, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal dan kepariwisataan.
- Dengan adanya Fantastic Creative Festival ini bisa menambah pengetahuan tentang macam-macam jenis ekonomi kreatif, mempromosikan potensi pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif, juga berfungsi untuk meningkatkan citra dan daya tarik investasi Kabupaten Tanah Laut.

3. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta penguatan peran komunitas dalam mengelola dan mempromosikan potensi lokal. Upaya ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan peluang usaha di sektor pariwisata.

Kegiatan ini meliputi :

- Kegiatan Gerakan Wisata (GESIT) & Goes To School

  Tujuan dari kegiatan ini adalah para siswa akan dikenalkan terhadap objek – objek wisata yang ada di Tanah Laut. Pengenalan ini meliputi pemberian pengetahuan kepada siswa tentang objek wisata, sejarah, ciri khas di ojek wisata tersebut, nilai – nilai budaya dan kearifan lokal di objek tersebut. Selain itu para siswa juga akan diperkenalkan pada beberapa pelaku ekonomi kreatif yang di sekitar objek tersebut dan dapat berinteraksi secara langsung dan melihat secara dekat bagaimana aktifitas ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan kepariwisataan.

- Pelatihan Rescue

  Kegiatan ini di laksanakan pada hari kamis tanggal 10 April 2025 bertempat di objek wisata Pantai Takisung. Jumlah peserta ada 50 peserta dan narasumber ada 2 orang.

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Objek Wisata

  Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Objek Wisata Tahun 2025 dilaksanakan pada 21 Agustus 2025 di Algoritma Café & Resto, Kecamatan Pelaihari, dan diikuti oleh masyarakat pengelola objek wisata, pengelola fasilitas wisata, Pokdarwis, serta perwakilan pengelola dari Kecamatan Takisung, Panyipatan, dan Bajuin.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

1. Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif

Peningkatan Kapasitas SDM Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif merupakan upaya penguatan kemampuan sumber daya manusia

melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing.

Kegiatan ini meliputi peningkatan keterampilan manajerial, pengembangan produk, pemasaran, serta pemahaman pengelolaan usaha yang efektif. Tujuannya adalah mendorong pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas produk/jasa, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Peningkatan Legalitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

1. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif

Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan sebagai langkah strategis untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Rencana aksi ini disusun melalui identifikasi potensi, kebutuhan pelaku usaha, serta sinergi dengan pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan kualitas produk, daya saing, perluasan pasar, dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah, kegiatan ini meliputi :

- Pengembangan aplikasi SIEKRAFU. Kegiatan ini merupakan pengembangan aplikasi SIEKRAFU yang sebelumnya dapat di akses di Playstore di kembangkan jadi dapat di akses di IOS (apple store).

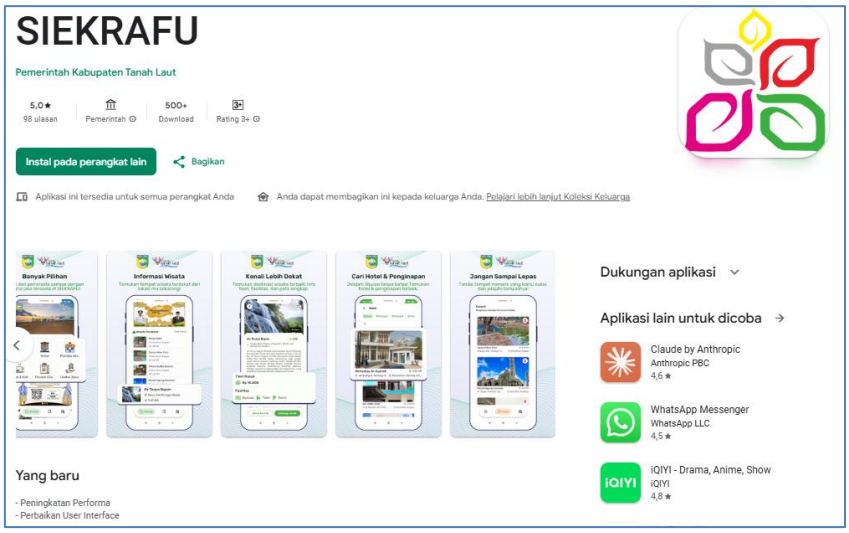

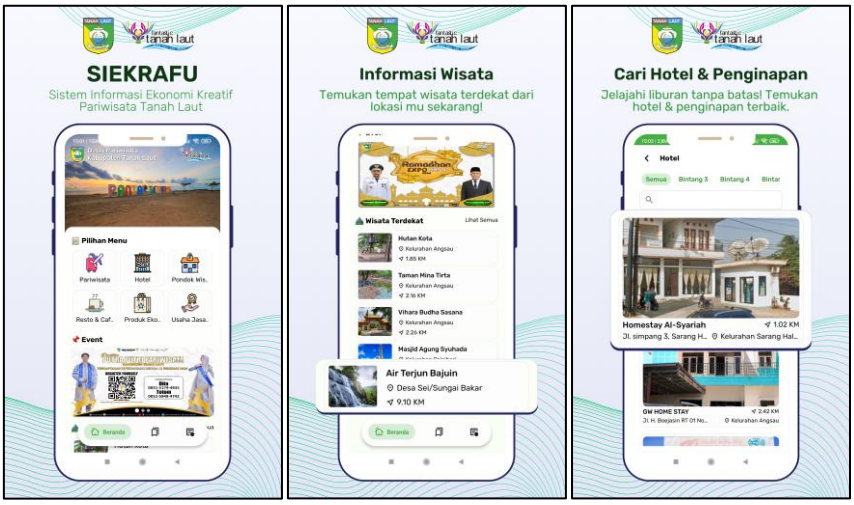

- Sosialisasi tentang pemanfaatan HKI. Waktu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan HKI Tahun 2025 Kamis 28 Agustus 2025 bertempat Aeris Hotel Banjarbaru Jl. Panglima Batur Jalan P. Suriansyah Ujung, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru. Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan HKI Tahun 2025 sebanyak 30 orang yang berasal dari Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.

2. Fasilitasi HKI Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pemanfaatan HKI sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan produk kreatif. Kegiatan ini memberikan informasi mengenai jenis-jenis HKI, prosedur pendaftaran, manfaat perlindungan merek, hak cipta, dan desain industri, serta strategi pemanfaatannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha.

Melalui sosialisasi ini diharapkan pelaku ekonomi kreatif mampu melindungi inovasi yang dihasilkan, mencegah terjadinya pelanggaran atau plagiarisme, serta memanfaatkan HKI sebagai aset usaha yang dapat mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong/Keberhasilan (Sesuaikan Dengan EKRAF)

1. Mengoptimalkan platform digital sebagai etalase ekonomi kreatif daerah yang mengintegrasikan promosi produk, informasi pelaku usaha, pemasaran daring, serta konektivitas dengan pasar dan wisatawan.
2. Mendorong sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif dan pengelola komunitas/kelompok usaha guna meningkatkan kualitas SDM, profesionalisme, dan daya saing produk.
3. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, serta pengelolaan risiko usaha bagi pelaku ekraf.
4. Memastikan ketersediaan sarana pendukung kegiatan ekonomi kreatif di destinasi wisata seperti ruang pamer, gerai UMKM, dan fasilitas produksi yang memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan.
5. Mengembangkan desa wisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komunitas melalui penguatan kelembagaan, inkubasi usaha, dan kolaborasi antar pelaku lokal.
6. Mendorong setiap destinasi wisata memiliki produk ekonomi kreatif unggulan yang beridentitas lokal (seperti kriya, kuliner olahan, dan fesyen tradisional) sebagai sumber nilai tambah ekonomi dan daya tarik wisata.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Terbatasnya literasi digital pelaku usaha sehingga pemanfaatan platform daring untuk promosi dan pemasaran belum optimal serta masih bergantung pada metode konvensional.

2. Belum meratanya sertifikasi kompetensi dan standar kualitas produk, yang menyebabkan daya saing produk ekonomi kreatif masih rendah di pasar yang lebih luas.
3. Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan usaha, terutama bagi pelaku ekraf skala mikro, sehingga menghambat pengembangan usaha dan inovasi produk.
4. Kurangnya kesinambungan pendampingan dan pembinaan, sehingga pelatihan yang telah diberikan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi serta pemasaran, seperti ruang display, alat produksi, dan fasilitas logistik yang memadai.
6. Belum kuatnya kelembagaan dan jejaring kolaborasi antar pelaku ekraf, komunitas, dan pemangku kepentingan, sehingga pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berjalan parsial.
7. Inovasi produk yang masih terbatas dan kurang berorientasi pasar, menyebabkan produk kurang adaptif terhadap tren, selera konsumen, dan kebutuhan wisatawan.
8. Kendala dalam menjaga konsistensi kualitas dan kuantitas produksi, terutama pada usaha berbasis rumah tangga yang masih memiliki kapasitas produksi terbatas.
9. Kurangnya strategi branding dan identitas lokal yang kuat, sehingga produk ekonomi kreatif belum memiliki diferensiasi yang jelas sebagai ciri khas daerah.
10. Akses pemasaran yang belum terintegrasi dengan sektor pariwisata, mengakibatkan peluang belanja wisata (tourist spending) terhadap produk ekraf belum maksimal.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Peningkatan literasi digital pelaku ekraf melalui pelatihan praktis penggunaan marketplace, media sosial, dan strategi pemasaran digital agar pelaku usaha mampu memasarkan produk secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Fasilitasi sertifikasi kompetensi dan standarisasi produk bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas SDM, legalitas usaha, serta kepercayaan pasar terhadap produk ekonomi kreatif.

3. Penguatan program pendampingan usaha secara berkelanjutan melalui mentoring, coaching clinic, dan monitoring perkembangan usaha agar pelatihan yang diberikan dapat diimplementasikan secara nyata.
4. Pengembangan akses permodalan dan kemitraan usaha dengan menghubungkan pelaku ekraf kepada lembaga keuangan, program bantuan pemerintah, maupun skema kolaborasi dengan sektor swasta.
5. Penyediaan dan optimalisasi sarana pendukung ekraf di destinasi wisata, seperti ruang pamer, gerai produk lokal, serta fasilitas produksi bersama (co-working/rumah kreatif).
6. Penguatan kelembagaan dan jejaring komunitas ekonomi kreatif melalui pembentukan forum komunikasi, kolaborasi lintas sektor, serta sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan swasta.
7. Pengembangan produk unggulan berbasis identitas lokal melalui inovasi desain, kemasan, dan storytelling produk agar memiliki nilai tambah serta menjadi daya tarik wisata.
8. Integrasi pemasaran produk ekraf dengan promosi pariwisata daerah melalui event, paket wisata, katalog digital, dan etalase di destinasi sehingga meningkatkan belanja wisatawan terhadap produk lokal.
9. Peningkatan kapasitas produksi dan manajemen usaha melalui pelatihan teknis produksi, pengendalian kualitas, serta manajemen rantai pasok agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar.
10. Penyusunan strategi branding ekonomi kreatif daerah secara terpadu untuk membangun citra produk lokal yang kuat, konsisten, dan mudah dikenali di tingkat regional maupun nasional.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 62 ASN pada Dinas Pariwisata serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 11.391.740.207,90 dan terealisasi Rp. 10.202.337.298,00 atau sebesar 89,56%.

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi

1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.498.667.708,11	4.979.758.020,00
		Program Pemasaran Pariwisata	4.651.547.803,07	4.039.167.882,00
2	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92.010.423,77	87.204.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.149.514.272,95	1.096.207.396,00
		JUMLAH	**11.391.740.207,90**	**10.202.337.298,00**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata

$$\text{Efisiensi} = \frac{(9.057.704.687,88 \times 122,6\%) - 8.068.569.902}{(9.057.704.687,88 \times 122,6\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 27,34\%$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
122,6%	89,08%	27,34%

2. Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata

$$\text{Efisiensi} = \frac{(1.241.524.696{,}72 \times 156{,}2\%) - 1.183.411.396}{(1.241.524.696{,}72 \times 156{,}2\%)} \text{ X } 100\%$$

Efisiensi = 38,98%

Tabel 3.1.5
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
156,2%	95,32%	38,98%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 1,945.294.000,00 (108,07%) dan anggaran belanja sebesar Rp. 21.246.804.116,67. Sehingga mengalami Depisit Anggaran

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.945.294.000,00. dan belanja sebesar Rp21.246.804.116,67 serta belanja transfer sebesar Rp. 270.073.187.012,00 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 19.446.804.116,67

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 1.945.294.999,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 0,00 maka sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp. 110.263.245.805,65

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (SILPA) adalah jumlah defisit sebesar Rp. 110.263.245.805,65..ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp. 16.469.601.175.,00 maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2025 posisi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 110.263.2245.805,65.

TUJUAN I

Tabel 3.6
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program			
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata (%)	10		1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.498.667.708,11	4.979.758.020	90,56
							Program Pemasaran Pariwisata	4.651.547.803,07	4.039.167.882	86,83
2	Meningkatnya Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	1	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata (%)	10		2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92.010.423,77	87.204.000	94,78
							Program Pengembangan Sumber Daya	1.149.514.272,95	1.096.207.396	95,36

							Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**108,07**	**1.732.835.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**108,07**	**1.732.835.000,00**
4.1.02	Pajak Daerah	1.800.000.000,00	1.945.294.000,00	108,07	1.732.835.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.800.000.000,00	1.945.294.000,00	108,07	1.732.835.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	125.740.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.602.810.000,00	1.730.034.000,00	107,94	1.607.095.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	197.190.000,00	215.260.000,00	109,16	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**108,07**	**1.732.835.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**108,07**	**1.732.835.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**21.246.804.116,67**	**18.414.895.175,00**	**86,67**	**12.250.793.647,00**

5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.682.576.138,05**	**13.388.651.496,00**	**85,37**	**9.247.697.391,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**5.322.698.133,00**	**4.203.197.687,00**	**78,97**	**3.756.063.391,00**
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.452.899.265,00	1.928.975.287,00	78,64	1.738.610.906,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.842.690.868,00	2.247.222.500,00	79,05	1.957.620.957,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	43.131.854,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	27.108.000,00	26.999.900,00	99,60	16.699.674,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.359.878.005,05**	**9.185.453.809,00**	**88,66**	**5.491.634.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.026.418.132,04**	**1.738.171.148,00**	**85,78**	**1.022.923.061,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**6.343.121.384,61**	**5.661.166.505,00**	**89,25**	**2.849.634.099,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**593.783.988,40**	**579.156.900,00**	**97,54**	**355.341.541,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**850.554.500,00**	**660.959.256,00**	**77,71**	**1.197.845.299,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**546.000.000,00**	**546.000.000,00**	**100,00**	**65.890.000,00**
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**15.682.576.138,05**	**13.388.651.496,00**	**85,37**	**9.247.697.391,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.564.227.978,62**	**5.026.243.679,00**	**90,33**	**3.003.096.256,00**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.616.000,00**
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	72.616.000,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**663.016.524,09**	**493.014.697,00**	**74,36**	**734.352.680,00**
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	117.090.879,00	109.800.002,00	93,77	649.900.000,00

5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.070.053,25	33.659.000,00	88,41	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	310.953.140,34	174.751.084,00	56,20	80.702.680,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	71.747.997,00	54.875.000,00	76,48	3.750.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	125.154.454,50	119.929.611,00	95,83	0,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**4.851.261.454,53**	**4.488.228.982,00**	**92,52**	**2.158.302.576,00**
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.742.931.004,53	4.392.970.157,00	92,62	2.158.302.576,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	108.330.450,00	95.258.825,00	87,93	0,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**49.950.000,00**	**45.000.000,00**	**90,09**	**37.825.000,00**
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	49.950.000,00	45.000.000,00	90,09	37.825.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**5.564.227.978,62**	**5.026.243.679,00**	**90,33**	**3.003.096.256,00**
JUMLAH BELANJA		**21.246.804.116,67**	**18.414.895.175,00**	**86,67**	**12.250.793.647,00**
JUMLAH BELANJA (Operasi + Modal)		**26.811.032.095,29**	**23.441.138.854,00**	**88,50**	**15.253.889.903,00**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	6	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**1.732.835.000,00**	12%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**1.732.835.000,00**	12%
4.1.02	Pajak Daerah	1.800.000.000,00	1.945.294.000,00	1.732.835.000,00	12%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.800.000.000,00	1.945.294.000,00	1.732.835.000,00	12%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	125.740.000,00	-100%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.602.810.000,00	1.730.034.000,00	1.607.095.000,00	8%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	197.190.000,00	215.260.000,00	0,00	12%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**1.732.835.000,00**	12%
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.800.000.000,00**	**1.945.294.000,00**	**1.732.835.000,00**	12%

5	**BELANJA DAERAH**	**21.246.804.116,67**	**18.414.895.175,00**	**12.250.793.647,00**	50%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.682.576.138,05**	**13.388.651.496,00**	**9.247.697.391,00**	45%
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**5.322.698.133,00**	**4.203.197.687,00**	**3.756.063.391,00**	12%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.452.899.265,00	1.928.975.287,00	1.738.610.906,00	11%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.842.690.868,00	2.247.222.500,00	1.957.620.957,00	15%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	43.131.854,00	-100%
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	27.108.000,00	26.999.900,00	16.699.674,00	62%
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.359.878.005,05**	**9.185.453.809,00**	**5.491.634.000,00**	67%
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.026.418.132,04**	**1.738.171.148,00**	**1.022.923.061,00**	70%
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**6.343.121.384,61**	**5.661.166.505,00**	**2.849.634.099,00**	99%
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**593.783.988,40**	**579.156.900,00**	**355.341.541,00**	63%
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**850.554.500,00**	**660.959.256,00**	**1.197.845.299,00**	-45%
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**546.000.000,00**	**546.000.000,00**	**65.890.000,00**	729%
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**15.682.576.138,05**	**13.388.651.496,00**	**9.247.697.391,00**	45%
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.564.227.978,62**	**5.026.243.679,00**	**3.003.096.256,00**	67%
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**0,00**	**0,00**	**72.616.000,00**	-100%
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	72.616.000,00	-100%
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**663.016.524,09**	**493.014.697,00**	**734.352.680,00**	-33%

5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	117.090.879,00	109.800.002,00	649.900.000,00	-83%
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.070.053,25	33.659.000,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	310.953.140,34	174.751.084,00	80.702.680,00	117%
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	71.747.997,00	54.875.000,00	3.750.000,00	1363 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	125.154.454,50	119.929.611,00	0,00	
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**4.851.261.454,53**	**4.488.228.982,00**	**2.158.302.576,00**	108%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.742.931.004,53	4.392.970.157,00	2.158.302.576,00	104%
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	108.330.450,00	95.258.825,00	0,00	
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**49.950.000,00**	**45.000.000,00**	**37.825.000,00**	
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	49.950.000,00	45.000.000,00	37.825.000,00	
JUMLAH BELANJA MODAL		**5.564.227.978,62**	**5.026.243.679,00**	**3.003.096.256,00**	19%
JUMLAH BELANJA		**21.246.804.116,67**	**18.414.895.175,00**	**12.250.793.647,00**	19%
JUMLAH BELANJA (Operasi + Modal)		**26.811.032.095,29**	**23.441.138.854,00**	**15.253.889.903,00**	**54%**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 139,4% dengan tingkat capaian kinerja berkategori memenuhi kriteria **Sangat Tinggi.**

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pariwisata dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.
2. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang.
3. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
4. Membangun atau mengoptimalkan platfom digital yang mengintegrasikan informasi rute, harga tiket, kalender even, hingga direktri UMKM lokal.
5. Mendorong sertifikasi bagi pemandu wisata lokal dan pengelola kelompok standar wisata (Pokdarwis).
6. Menjadikan desa wisata sebagai unit ekonomi mandiri melalui pendampingan intensipmelalui penguatan pokdarwis.
7. Mewajibkan setiap destinasi wisata memiliki ekonomi kreatif untuk produk unggulan lokal (sasirangan, kerupuk ikan kerajian tangan).
8. memberikan *reward* dan *punishment* kepada ASN Dinas Pariwisata sesuai dengan kinerjanya.

Pelaihari, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Pariwisata Kab.Tanah Laut

ZULPUADDIN, S.Sos
Pembina (IV/b)
NIP. 19700220 19993013 1 012

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PARIWISATA KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Kepala Dinas**				
	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	10%	12,26	226%
	Meningkatnya Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	10%	9,6	40%
2	**Sekretaris**				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,1 Nilai		
3	**Kepala Bidang PSDM Ekraf**				
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata tersertifikasi	2%	2%	100%
	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	10%	10%	100%
	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata yang memiliki HKI	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HKI	5%	5%	100%
4	**Kepala Bidang Pemasaran**				
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan	5%	-4,08%	-9,08%
	Meningkatnya Kerjasama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Kerjasama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%
	Meningkatnya Promosi Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata yang dipublikasikan	3 Promosi	3 Promosi	100%
5	**Kepala Bidang Destinasi**				
	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata Potensial	Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang	20%	20%	100%
	Peningkatan daya tarik obyek Wisata Potensial	Persentase Jumlah Obyek Wisata Potensial yang dieksplore	100%	100%	100%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang sesuai Standar	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang sesuaikan standar	100%	100%	100%
7	**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**				
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dalam Pelayanan Perencanaan dan Keuangan Kesekretariatan	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan Dinas Pariwisata	Nilai Indeks 3	Nilai Indeks 3	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas Pariwisata	Nilai Indeks 3	Nilai Indeks 3	100%
8	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**				
	Meningkatnnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
6	**Kepala UPT Pantai Takisung**				

	Melakukan layanan administrasi perkantoran pada UPT Obyek Wisata Pantai Takisung	Jumlah Layanan administrasi Perkantoran pada UPT Obyek Wisata Pantai Takisung yang dilaksanakan	2 Sarpras	2 Sarpras	100%
	Pemenuhan & pemeliharaan sarpras perkantoran pada UPT Obyek Wisata Pantai Takisung	Jumlah sarpras kantor UPT yang terpenuhi	2 Sarpras	2 Sarpras	100%
		Jumlah sarpras kantor UPT yang terpelihara	10 Sarpras	10 Sarpras	100%

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp/Fax. (0512)- 21178 E-mail : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULPUADDIN, S.SOS

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	ZULPUADDIN, S.SOS
	NIP 197002021993031012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	10 %
2	Meningkatnya Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	10 %
3	-	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.498.667.708
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.651.547.802
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	92.010.424
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.149.514.273
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.855.063.909

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT

H. RAHMAT TRIANTO

Kepala Dinas

ZULPUADDIN, S.SOS
NIP 197002021993031012

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp/Fax. (0512)- 21178 E-mail : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. HENNY HASTUTY, S.SOS

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Zulpuaddin, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Zulpuaddin, S.Sos	HJ. HENNY HASTUTY, S.SOS
197002021993031012	NIP 19700826 200604 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,1 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.855.063.909

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

Zulpuaddin, S.Sos
197002021993031012

Sekretaris

HJ. HENNY HASTUTY, S.SOS
NIP 19700826 200604 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp/Fax. (0512)- 21178 E-mail : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Yamini, S.Sos., MA.Cd

Jabatan : Kepala Bidang PSDM & Ekraf

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Zulpuaddin, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Zulpuaddin, S.Sos	Ahmad Yamini, S.Sos., MA.Cd
197002021993031012	NIP 19740412 199903 1 007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Pariwisata TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata (PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF)	Persentase SDM Pariwisata tersertifikasi	2%
2	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF)	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	10%
3	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata yang memiliki HKI (PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HKI	5%
4	Meningkatnya Pelatihan SDM Pariwisata (Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar)	Persentase Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	5%
5	Meningkatnya Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif)	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang di bina	5%
6	Meningkatnya Usaha Ekraf yang di fasilitasi HKI (Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif)	Persentase Usaha Ekraf yang di Fasilitasi HKI	5 %
7	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	210 Orang

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif)		
8	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata)	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan	950 Orang
9	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	195 Orang
10	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen

No	Porgram Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp. 92.010.423,77
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 1.085.502.160,95
3	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp. 64.012.112,00
	Sub Kegiatan	
4	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 92.010.423,77
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif	Rp. 756.824.047,5
6	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp. 328.678.113,45
7	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp. 64.012.112,00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

No	Porgram Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Rp. 92.010.423,77**
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Rp. 1.149.514.272,95**

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

Zulpuaddin, S.Sos
197002021993031012

Kepala Bidang PSDM Ekraf

Ahmad Yamini, S.Sos., MA.Cd
NIP 19740412 199903 1 007

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp/Fax. (0512)- 21178 E-mail : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMIDAH, SIP

Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Zulpuaddin, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Zulpuaddin, S.Sos	HAMIDAH, SIP
197002021993031012	NIP 19720617 199303 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA)	Persentase Kunjungan Wisatawan	5 %
2	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata (Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota)	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 1
3	Terlaksananya penyediaan data informasi Kepariwisataan (Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen
4	Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Event Pariwisata/Budaya (Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri)	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen
5	Terselenggaranya Event Wisata (Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota)	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan
6	Terlaksananya Promosi Pariwisata (Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.651.547.802
	Sub Kegiatan	
2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	249.748.323
3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.151.223.210
4	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	350.889.912
5	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	899.686.357
	Program	
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.651.547.802

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

Zulpuaddin, S.Sos
197002021993031012

Kepala Bidang Pemasaran

HAMIDAH, SIP
NIP 19720617 199303 2 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp/Fax. (0512)- 21178 E-mail : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRY KURNIAWAN, S.PI

Jabatan : Kepala Bidang Destinasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Zulpuaddin, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Zulpuaddin, S.Sos	ANDRY KURNIAWAN, S.PI
197002021993031012	NIP 19760923 200501 1 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata Potensial (PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA)	Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang	20 %
2	Peningkatan daya tarik obyek Wisata Potensial (Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota)	Persentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100 %
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang sesuai Standar (Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota)	Persentase Capaian Pengelolan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %
4	Terlaksanya Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota (Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan
5	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
6	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota)		
7	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota (Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.092.510.823
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.406.156.885
	Sub Kegiatan	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	315.330.432
4	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	777.180.391
5	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.217.655.860
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	188.501.025
	Program	
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.498.667.708

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
TANAH LAUT

Zulpuaddin, S.Sos
197002021993031012

Kepala Bidang Destinasi

ANDRY KURNIAWAN, S.PI
NIP 19760923 200501 1 00

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA
Alamat: Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email: dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR: 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAB/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Dinas Pariwisata kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025-2029 di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Dinas Pariwisata kabupaten Tanah Laut;

c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6858);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAB/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAB/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118)

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut periode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Kepala Dinas Pariwisata

Zulpuaddin, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700202 199303 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 32 Tahun 2025
TANGGAL : 24 Februari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Dinas Pariwisata
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan Teknis bidang Pariwisata;
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwista
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pembinaan UPT Dinas;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan;
g. Pengelolaan urusan kesekretariatan;

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	$= \frac{Jumlah\ PAD\ Sektor\ Pariwisata\ tahun\ N}{Total\ keseluruhan\ PAD\ Tahun\ N}\ x\ 100\%$	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
		2	Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	$= \frac{Jumlah\ Pelaku\ Usaha\ yg\ bersertifikasi}{Jumlah\ seluruh\ Pelaku\ Ekonomi\ Kreatif}\ x\ 100\%$	

a.n. Bupati Tanah Laut
Kepala Dinas Pariwisata

Zulpnaddin, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700202 199303 1 012

REALISASI RENCANA AKSI

TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Realisasi							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	10						5.913.545.908	1.655.158.545	5	2.138.588.542	5	21.312.500	5	127.286.700	10
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang	%	20	2.800.279.714	566.405.988	5	1.910.867.738	10		10		20
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Persentase Jumlah Objek Wisata Potensial yang Dikembangkan	%	100	661.810.820	276.994.824	25	180.835.000	50		75	-	100
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	264.630.410	264.630.410	0		1		0		0
						Penyusunan dan Penyerangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	197.160.390	12.891.990	25	184.835.000	0		0		4
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang Dimanfaatkan Wisata	%	100	1.998.862.890	869.232.160	25	1.729.052.708	50		75		100
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terpelihara dan Terkelola	Unit	11	1.990.499.416	265.635.716	2	1.729.052.708	2		0		11
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	3.970.638	3.970.638	1		0		0		0
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Kunjungan Wisatawan	%	5	5.850.272.350	1.098.752.175	1	355.720.850	3	21.312.500	1	127.286.700	5
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dapa Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata	%	5	5.850.272.350	1.098.752.175	0	355.720.850	0	21.312.500	0	127.286.700	0
							Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	%	10			2		2		3		3
						Penyimpan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan luar Negeri	Dokumen	7	399.952.999	399.952.999	0		2		2		0
						Peningkatan Arsip Seni dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kemitraan Pariwisata Dalam dan luar Negeri	Dokumen	11	701.293.360	397.772.550	2	255.720.850	2	21.312.500	2	127.286.700	5
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	8	201.314.903	201.314.903	1		2		2		3
						Pengadaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	3	299.713.535	299.713.535	0		1		1		1
	Meningkatnya Kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan Kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	%	10						1.200.027.175	277.871.127	5	238.549.602	5	670.285.696	8	5.320.000	10
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMBERDAYAAN SDM PENGELOLAAN PARIWISATA		Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HKI	%	5	80.782.902	80.782.902	1		4		4		5
						Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Usaha Ekraf yang di Fasilitasi HKI	%	100	80.782.902	80.782.902	25		50		75		100
						Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	80.782.902	80.782.902	0		0		1		0
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	%	30	1.119.244.273	197.090.225	5	238.549.602	5	670.285.696	8	5.320.000	10
							Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	%	2			0		0		1		2
						Pelatihcatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang Sertifik	%	100	1.059.232.565	165.378.113	25	116.195.602	50	670.285.696	75	5.320.000	100
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	210	750.304.018	11.000.000	25	99.000.000	25	634.304.018	50	6.320.000	100
						Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	993	324.928.113	154.378.113	100	117.195.000	600	53.350.000	2		200
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengelolaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang di Kola	%	100	64.012.112	31.712.112	25	32.300.000	50		75		100
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	190	64.012.112	31.712.112	5	32.300.000	100		90		0
					PROGRAM PENGUNDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100	7.988.662.869	4.705.435.559	30	930.738.109	50	930.905.599	75	191.966.097	100
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,1			0		0		0		80
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen publik-perpustakaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	%	100	11.997.518	11.997.518	25		50		75		100
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)*		4	6.997.814	6.997.814	2		1		1		0
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	4.999.704	4.999.704	1		2		3		0
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.932.687.654	5.932.687.654	25		50		75		100
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	25	5.322.689.116	5.322.689.116	0		0		0		25
						Pelaksanaan Perubahan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan dan Pengajuan/verifikasi Keuangan	Dokumen	3	9.999.520	9.999.520	0		3		0		0
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	2.494.304	2.494.304	25		50		75		100
						Perlatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perlatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	2.494.304	2.494.304	1		0		0		0
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	41.880.049	41.880.049	25		50		75		100
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	16.880.049	16.880.049	0		27		0		0
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	25.000.000	25.000.000	0		0		0		5
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	565.500.115	411.575.115	25	97.125.000	50	750.000	75	35.750.000	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	16.579.969	16.579.969	10		1		2		0
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	69.950.000	69.950.000	0		0		0		0
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	16.529.581	16.529.581	0		0		0		0
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	19.999.616	19.999.616	1		1		1		1
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3.000.000	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	15.000.000		0		0		1	15.000.000	2
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	222.036.010	203.361.010	3	18.675.000	3		3		3
						Perlatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Perlatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	9.364.109	9.364.109	1		0		0		0
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	382.209.295	382.209.295	25		50		75		100
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	117.090.879	117.090.879	0		0		2		0
						Pengadaan Meteai	Jumlah Paket Meterai yang Disediakan	Unit	7	19.906.660	19.906.660	6		0		0		0
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	94.881.303	94.881.303	9		8		7		7
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	108.330.450	108.330.450	0		0		0		1
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.008.969.680	423.083.539	25	108.383.539	50	472.383.539	75	105.119.064	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	350.000.000	87.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000	0
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.138.969.680	355.583.539	3	360.883.539	3	384.883.539	3	57.619.064	3
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	424.923.850	273.500.850	25	86.500.000	50	67.923.000	75	51.000.000	100
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perusahaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perusahaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayai Pajaknya	Unit	1	32.500.000	15.000.000	0	10.000.000	0	7.500.000	0		1
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	193.933.020	93.000.000	10	76.500.000	1	80.000.000	0	31.000.000	0
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	19.913.600	19.913.600	10		5		10		0
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	181.590.000	181.590.000	0		0		0		0

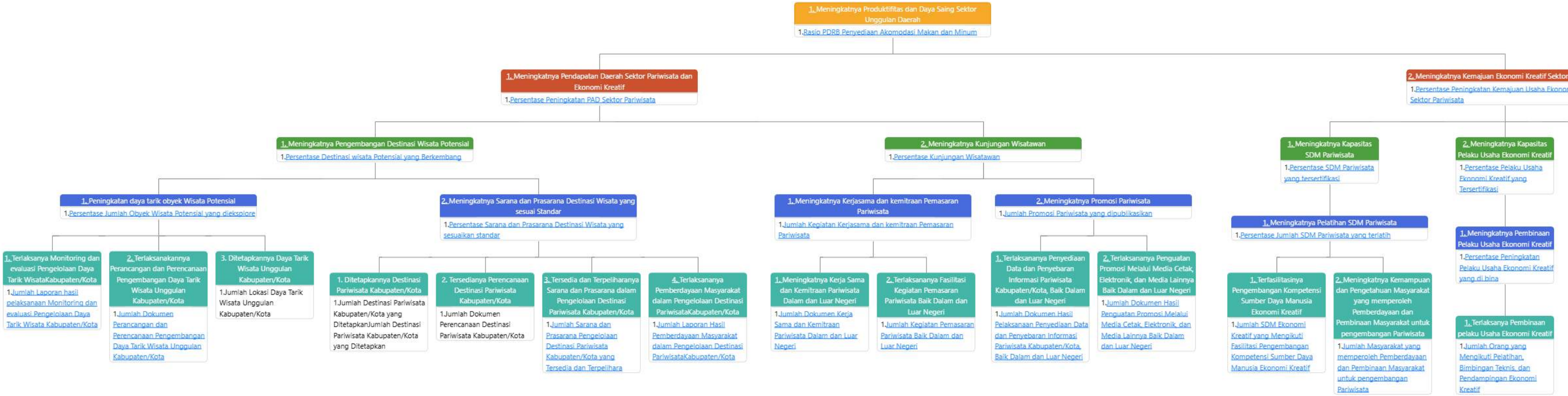

- 1. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah
  1.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
  - 1. Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    1.Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
    - 1. Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata Potensial
      1.Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang
      - 1. Peningkatan daya tarik obyek Wisata Potensial
        1.Persentase Jumlah Obyek Wisata Potensial yang dieksplore
        - 1. Terlaksanya Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota
          1.Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
        - 2. Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
          1.Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
        - 3. Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
          1Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
      - 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang sesuai Standar
        1.Persentase Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata yang sesuaikan standar
        - 1. Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
          1Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang DitetapkanJumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
        - 2. Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
          1Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
        - 3. Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
          1.Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
        - 4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota
          1.Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota
    - 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
      1.Persentase Kunjungan Wisatawan
      - 1. Meningkatnya Kerjasama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata
        1.Jumlah Kegiatan Kerjasama dan kemitraan Pemasaran Pariwisata
        - 1. Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
          1.Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
        - 2. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
          1.Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
      - 2. Meningkatnya Promosi Pariwisata
        1.Jumlah Promosi Pariwisata yang dipublikasikan
        - 1. Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
          1.Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
        - 2. Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
          1.Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
  - 2. Meningkatnya Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor
    1.Persentase Peningkatan Kemajuan Usaha Ekono Sektor Pariwisata
    - 1. Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata
      1.Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi
      - 1. Meningkatnya Pelatihan SDM Pariwisata
        1.Persentase Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih
        - 1. Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
          1.Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
        - 2. Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
          1.Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
    - 2. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
      1.Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi
      - 1. Meningkatnya Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
        1.Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang di bina
        - 1. Terlaksanya Pembinaan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
          1.Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

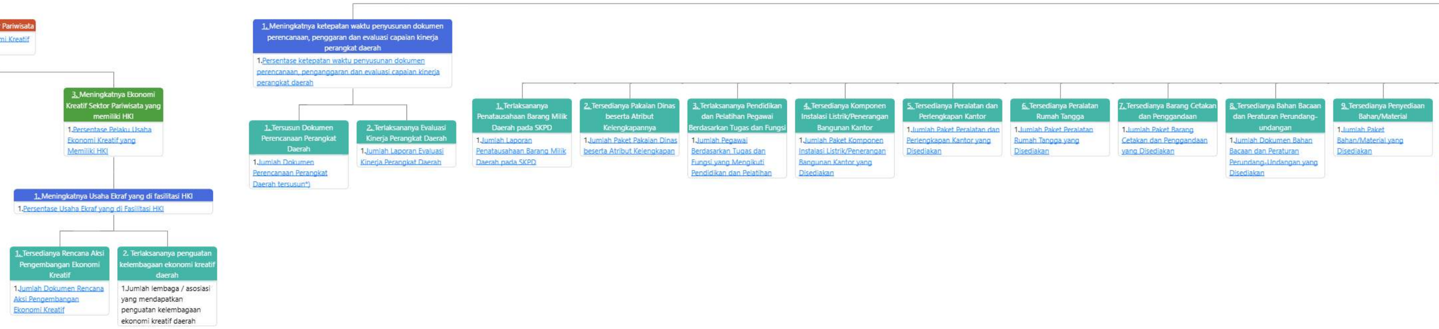

- Pariwisata
  - mi Kreatif
- 3. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata yang memiliki HKI
  - 1.Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HKI
  - 1. Meningkatnya Usaha Ekraf yang di fasilitasi HKI
    - 1.Persentase Usaha Ekraf yang di Fasilitasi HKI
    - 1. Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
      - 1.Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
    - 2. Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah
      - 1.Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah

- 1. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
  - 1.Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
  - 1. Tersusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)
  - 2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 1.Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 2. Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- 3. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- 4. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- 5. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- 6. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
  - 1.Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
- 7. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 1.Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
- 8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- 9. Tersedianya Penyediaan Bahan/Material
  - 1.Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

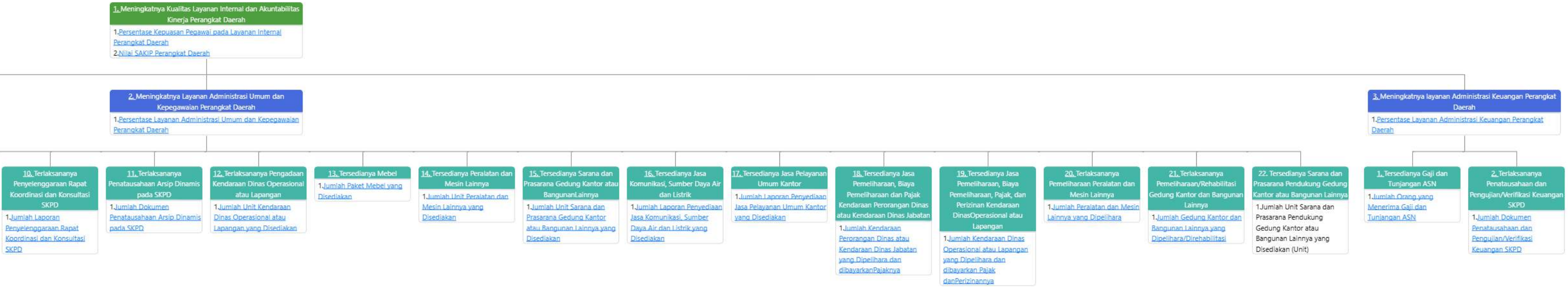

- 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah
  - 2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - 2. Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 10. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      - 1.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 11. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
      - 1.Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    - 12. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - 1.Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
    - 13. Tersedianya Mebel
      - 1.Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
    - 14. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
      - 1.Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
    - 15. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya
      - 1.Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
    - 16. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - 1.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
    - 17. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
      - 1.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
    - 18. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - 1.Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya
    - 19. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
      - 1.Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya
    - 20. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - 1.Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
    - 21. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      - 1.Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
    - 22. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      - 1.Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
  - 3. Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
      - 1.Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - 1.Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

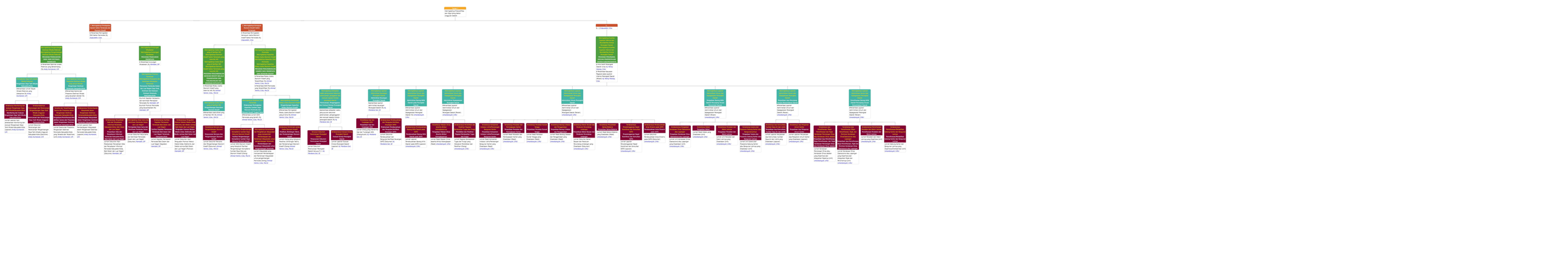

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/229/LHE AKIP-Irban II/Insp/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/330/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	**A**	**> 80 – 90**	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	**BB**	**> 70 – 80**	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	**B**	**> 60 – 70**	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	**CC**	**> 50 – 60**	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	**C**	**> 30-50**	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	**D**	**>0 – 30**	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,15 dengan predikat **"A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,30
d. Evaluasi Internal	25,00	20,75	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		81,95	82,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu kondisi tujuan, sasaran sudah mencapai hasil terkait dengan isu-isu strategis. Kondisi ini telah sesuai dengan kriteria Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Hanya saja Pohon Kinerja masih perlu direviu/diperbaiki karena belum terdapat *crosscutting* yang menggambarkan keterkaitan dengan bidang/skpd lainnya.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan

data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Dokumen IKU telah memiliki formulasi perhitungan, definisi operasional,sumber data dan/pengampu. Kondisi ini telah sesuai dengan kriteria bahwa telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Hanya saja formulasi perhitungan masih perlu dipastikan lagi untuk memperkuat relevansinya dalam mengukur kinerja yang ingin dicapai;
2) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Dinas PariwisataTahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Dokumen Lapkin telah ditandatangan Pimpinan dan telah terdapat Pernyataan pimpinan bahwa lapkin datanya benar. Namun pada saat

dilakukan evaluasi terhadap dokumen Lapkin sebelum perbaikan, masih terdapat beberapa kesalahan dalam penyajiannya, antara lain :

- Capaian nilai hasil evaluasi sakip pada Lapkin, tidak sesuai dengan nilai pada LHE SAKIP 2024;
- Penyajian Perjanjian Kinerja (PK) pada Lapkin, tidak sesuai dengan dokumen PK itu sendiri, namun setelah dilakukan konfirmasi, PK yang disajikan di dalam Lapkin adalah PK yang terupdate;
- Angka yang disajikan untuk menjelaskan isi table, berbeda dengan angka pada table itu sendiri;
- Target yang disajikan dalam Lapkin belum sepenuhnya sesuai dengan target pada dokumen Renja Perubahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dokumen Lapkin memang telah direviu namun belum sepenuhnya direviu secara mendalam.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Namun belum memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya.
3) Meskipun dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), namun dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan daerah lain. Hanya saja belum terdapat analisis terkait perbandingan tersebut;
4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memuat analisisnya.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **21,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah ditindaklanjuti hanya saja pelaksanaan keseluruhan dari sistem AKIP belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Menyusun Pohon Kinerja yang memuat *crosscutting* antar bidang/skpd;
b. Formulasi perhitungan pada dokumen IKU agar dipastikan lagi kesesuaiannya dengan rumusan kinerja yang ingin dicapai sehingga relevan untuk mengukur kinerja;
c. Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik *(feedback)* dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
d. Terkait masih adanya kesalahan di dalam penyajian pada dokumen Lapkin sebelumnya, agar kedepannya dilakukan reviu terhadap Dokumen Lapkin secara lebih mendalam;
e. Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tersebut, agar memuat analisis target dan realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding dan kesinambungan dari tahun sebelumnya;
f. Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan daerah lain tersebut, agar disempurnakan dengan disajikannya analisis terkait perbandingannya;
g. Dokumen Laporan Kinerja agar memuat analisis efisiensi sumber daya (target realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran);
h. Agar penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dinas Pariwisata menjadi kepedulian seluruh Pegawai, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga penyusunan dapat dilakukan secara tepat waktu per tahapan prosesnya, sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH				
DINAS PARIWISATA				
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025				
No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	2,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,00
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,30
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		1,25
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	A	1,25
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,15
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,

Hj. Riya Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

a. Perencanaan Kinerja

Pohon Kinerja 2025

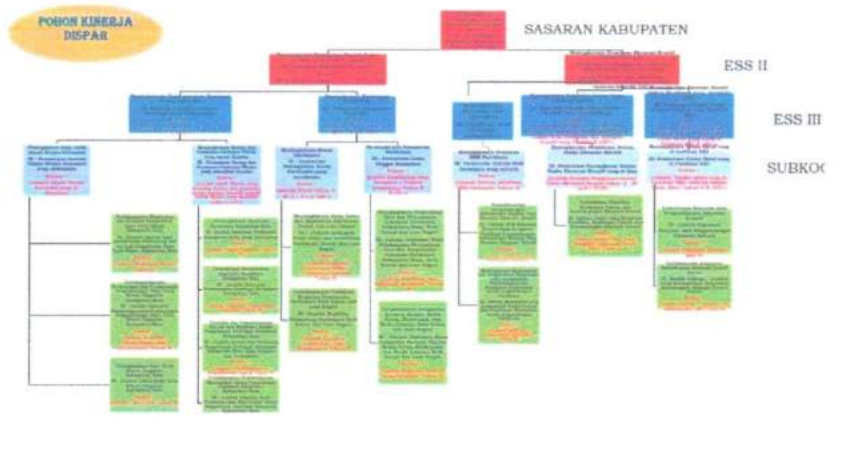

b. Pengukuran Kinerja

1) Formulasi perhitungan pada dokumen IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Dinas Pariwisata
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan Teknis bidang Pariwisata ;
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Pariwisata ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
d. Pelaksanaan administrasi dinas ;
e. Pembinaan UPT Dinas ;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan;
g. Pengelolaan urusan kesekretariatan;

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persentase PAD Sektor Pariwisata	$= \frac{\text{Jumlah PAD Sektor Pariwisata tahun N}}{\text{Total keseluruhan PAD Tahun N}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
		Persentase Peningkatan Kemajuan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	$= \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yg bersertifikasi}}{\text{jumlah seluruh Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	

An. Bupati Tanah Laut
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut

2) *Feedback* belum narasi

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: MARET

PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT — PERIODE PENILAIAN: 1 MARET SD 31 MARET TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ANANG IPANSYAH, ST, M.M.	1	NAMA	ZULFADDIN, S.Sos
2	NIP	197302172006011006	2	NIP	197003021993031012
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a
4	JABATAN	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	4	JABATAN	Kepala Dinas
5	UNIT KERJA	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	UNIT KERJA	Dinas Pariwisata

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / RERATA EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
TAMBAHAN							
1	Meningkatnya Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata Indikator : Persentase PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Kebijakan Pemerintah	Kuantitas	Persen Kenaikan Pariwisata	10000 orang	27% Realisasi https://docs.google.com/document/d/1Ugq2Zm0eOK-xWwHgcvt_9mvPTZ3gkwwmw/edit	Persentase: ★

RATING HASIL KERJA
(NILAI EKSPEKTASI)

PERILAKU KERJA — UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

c. Pelaporan

1) Target di lapkin berbeda dengan di Renja Perubahan

REKAPITULASI KINERJA FISIK & KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUTTAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Keterangan
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8=(7/4)	9	10	11
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM**	90 Nilai	8.179.240.673	90 Nilai		7.233.540.575	88,47	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	14.380.378	45 %		12.376.225	86,01	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.369.845	4 Dokumen	100,00	3.068.900	91,05	Dokumen RENSTRA, Dokumen RENJA, Dokumen Rkua, Dokumen DPA
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.469.531	5 Laporan	100,00	4.307.325	96,15	Laporan Monev Realisasi Fisik & Keuangan, Laporan SAKIP, Dokumen LPPD, Dokumen LKj, Dokumen LKP)
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	4.445.737.142	45 %		3.912.961.387	87,62	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	4.435.286.440	11 Orang Bulan	91,67	3.903.555.412	87,62	Gaji & tunjangan ASN 23 Orang
4	Pelaksanaan Perubahan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.450.747	2 Dokumen	100,00	9.437.973	90,14	Laporan Keuangan (Laporan CALK dan Laporan Triwulan)
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	17.394.900	45 %	45,00	12.100.000	70,75	

2) Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya belum memuat analisis

TABEL PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022, 2023 DAN 2024
DINAS PARIWISATA KAB. TANAH LAUT

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Peningkatan Pengunjung wisata (IKU 2023)	5%	66.60%	66.60%	5%	4.7%	4.7%	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10%	39.04%	390,4%
Persentase Jumlah Pengunjung Wisata (IKU 2019 sd 2022)	100% (295.000 orang)	579.678 orang	196.57%	100% (300.000 orang)	608.624 orang	202.9 %	Nilai Sakip Pariwisata	80%	70.16%	87.7%
Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina/bersertifikasi	100% (45 orang)	100% (45 Orang)	100%	100% (25 orang)	88% (22 Orang)	88%				
Persentase Kawasan Potensi dan Obyek Wisata yang dikembangkan	100% (7 obyek wisata)	100% (7 obyek wisata)	100%	100% (7 obyek wisata)	100% (8 obyek wisata)	114%				
Persentasi terkelolanya administrasi perkantoran dan kepegawaian (sekretariat)	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	100%	100% (12 bulan)	100% (12 bulan)	100%				
Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan (sekretariat)	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%				

3) Perbandingan dengan daerah lain, belum memuat analisis

Jumlah Data Kunjungan Wisata Tahun 2024 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1	Kota Banjarmasin	3.126.062	4.541
2	Kota Banjarbaru	2.849.483	843
3	Kabupaten Banjar	2.606.108	6.264
4	Kabupaten Tapin	3.156.776	26
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	715.111	757
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	227.911	0
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	167.627	0
8	Kabupaten Balangan	233.786	13
9	Kabupaten Tabalong	859.876	0
10	Kabupaten Tanah Laut	609.779	6
11	Kabupaten Tanah Bumbu	903.687	167
12	Kabupaten Kotabaru	990.280	89
13	Kabupaten Barito Kuala	196.323	189
	Total	**16.642.809**	**12.895**

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

4) Efisiensi yang belum memuat analisis

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi				Keterangan
					Fisik		Keuangan		
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8=(7/4)	9	10	11
4	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kawasan potensi objek wisata yang dikembangkan**	100 %	498.151.892	45 %		422.956.251	84.91	
19	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota	2 Laporan	126.960.243	1 Laporan	50,00	98.560.000	77,67	Keg. ini meliputi monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Kintap, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Panyipatan & monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kec. Takisung
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulankabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik WisataUnggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	371.190.649	1 Dokumen	50,00	324.396.251		Dokumen Kajian perencanaan pengembangan wisata dibuat sehghyang kec. Takisung & Dokumen kajian pengembangan potensi wisata Kab. Tanah Laut
5	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	5 OW	2.711.419.348	3 OW		2.462.916.172	90,83	
17	pengadaan,Pemeliharaan,Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit	2.365.468.546	9 Unit	81,82	2.126.914.886	89,93	* OW Pantai Takisung 1. rehabilitasi toilet/air pantai takisung 2. Rehab Mushola OW Pantai Takisung

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009